

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan, salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD 1945 itu, dalam batang tubuh konstitusi diantaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang, sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan

akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*), sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan merupakan upaya memberdayakan peserta didik untuk berkembang menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yaitu yang menjunjung tinggi dan memegang dengan teguh norma dan nilai yaitu norma agama dan kemanusiaan, norma persatuan bangsa, norma kerakyatan dan demokrasi, dan norma keadilan sosial. Norma agama dan kemanusiaan menuntun kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk individu, maupun makhluk sosial. Norma persatuan dan kesatuan bangsa menuntun kita untuk membentuk karakter bangsa dalam rangka memelihara keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Norma kerakyatan dan demokrasi menuntun kita untuk membentuk manusia yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kerakyatan dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Norma keadilan sosial adalah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan bermutu bagi seluruh bangsa serta menjamin penghapusan segala bentuk diskriminasi dan terlaksananya pendidikan untuk semua dalam rangka mewujudkan masyarakat berkeadilan sosial. Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada empat paradigma universal yang perlu diperhatikan antara lain pemberdayaan manusia seutuhnya, pembelajaran sepanjang hayat pada

peserta didik, pendidikan untuk semua, pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan/atau pembangunan berkelanjutan.

Menurut data Badan Pencatat Statistik (BPS) kondisi eksternal pendidikan nasional pada periode 2005-2009 dalam penyediaan layanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah menunjukkan peningkatan. Angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang ini meningkat dari 39,09% pada tahun 2004 menjadi 50,62% pada tahun 2008. Pada tahun 2009 diperkirakan akan terjadi peningkatan APK menjadi 53,90%. Disparita APK pada jenjang PAUD antarwilayah terjadi penurunan yaitu dari 6,0% pada tahun 2004 menjadi 3,61% pada tahun 2008 dan diperkirakan turun menjadi 3% pada tahun 2009.

Tabel 1.1 Capaian PAUD Tahun 2004-2008

Jenjang pendidikan	Indikator kinerja	2004 (kondisi awal)	2005	2006	2007	2008
PAUD	APK(%)	39,09	42,34	45,63	48,32	50,62
	Disparitas APK antara Kabupaten dan Kota (%)	6,04	5,42	4,37	4,2	

Sumber BPS data capaian PAUD tahun 2004-2008

Pada jenjang SD/MI/Pake A terjadi peningkatan angka partisipasi kasar (APK) dari 112,5 % pada tahun 2004 menjadi 116,56% pada tahun 2008 dan diperkirakan menjadi 116,95% pada tahun 2009. Seiring dengan itu angka partisipasi murni (APM) naik dari 94,12% pada tahun 2004 menjadi 95,14% pada tahun 2008, dan diperkirakan menjadi 95,40% pada tahun 2009. Pada jenjang SMP/MTs/ sederajat, APK meningkat dari 81,22% pada tahun 2004 menjadi 96,18% pada tahun 2008 dan diperkirakan menjadi 98,00% pada tahun 2009, seperti terlihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Capaian Pendidikan Dasar Tahun 2004-2008

Jenjang Pendidikan	Indikator Kinerja	2004 (Kondisi awal)	2005	2006	2007	2008
SD/MI/SDL B/ Paket A	APK (%)	112,5	112,2	112,57	115,71	116,56
	Disparitas APK antara Kabupaten dan Kota	2,49	2,49	2,43	2,4	2,28
	APM (%)	94,12	94,3	94,48	94,9	95,14
	Rerata Nilai UN	-	-			7,03
	Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) atau Dirintis Bertaraf Internasional (RSBI)	-	-	22	141	207
SMP/MTs/S MPLB/ Paket B	APK (%)	81,22	85,62	88,68	92,52	96,18
	Disparitas APK antara Kabupaten dan Kota	25,14	25,14	23,44	23	20,18
	Rerata nilai UN	5,26	6,28	7,05	7,02	6,87
	Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) atau Dirintis Bertaraf Internasional (RSBI)	0	0	34	170	277
	Rasio Lulusan SMP/MTs dan SMA /SMK/MA tidak melanjutkan mengikuti PKH (%)	5	6,5	12,7	12,5	16,4
	Medali emas Olimpiade Internasional	0	12	8	28	52

Sumber BPS Capaian Pendidikan Dasar Tahun 2004-2008

Disparitas APK SD/MI/Paket A/sederajat antara kabupaten dan kota menurun dari 2,5% pada tahun 2004 menjadi 2,3% pada tahun 2008 dan diperkirakan turun menjadi 2,2% pada tahun 2009. Sementara itu, disparitas

APK SMP/MTs/Paket B/ sederajat menurun dari 25,1% pada tahun 2004 menjadi 20,2% pada tahun 2008 dan diperkirakan turun menjadi 18,9% pada tahun 2009. Presentase kelulusan ujian dari mulai jenjang SMP/MTs dari tahun ajaran 2004/2005 sampai tahun 2007/2008 mengalami kenaikan walaupun tidak secara konsisten atau berfluktuasi dari tahun ke tahun. Rata-rata nilai UN SMP/MTs pada tahun 2008 adalah sebesar 6,87 dengan tingkat kelulusan sebesar 92,76%. Rata-rata nilai ujian SMP/MTs tersebut masih dibawah target 2008 yaitu 7. Hal ini mengkhawatirkan karena disamping target nasional tidak tercapai, juga tingkat kelulusan masih dibawah 95%.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan alokasi RAPBN 2010 untuk pendidikan sebesar 51,8 Triliun. Anggaran ini paling tinggi dibanding dengan alokasi anggaran lain. Program pendidikan menjadi prioritas pertama dengan biaya sekolah gratis. Tapi dalam kenyataan di masyarakat, sekolah gratis hanya sebuah jargon. Alokasi dana pendidikan ditujukan untuk program wajib belajar sembilan tahun dan pemerataan pendidikan di Indonesia dan juga meningkatkan daya saing dunia pendidikan. Program pemerintah berupa biaya SD dan SMP juga digratiskan, namun faktanya, meskipun anggaran pendidikan 2008 juga lebih tinggi dibanding anggaran lain, angka anak putus sekolah masih tinggi. Dilihat secara persentase, jumlah total siswa yang putus sekolah dari SD atau SMP memang hanya berkisar 2 hingga 3 persen dari total jumlah siswa. Namun, persentase yang kecil tersebut menjadi besar jika dilihat angka sebenarnya. Jumlah anak putus sekolah SD setiap tahun rata-rata berjumlah 600.000 hingga 700.000

siswa. Sementara itu, jumlah mereka yang tidak menyelesaikan sekolahnya di SMP sekitar 150.000 sampai 200.000 orang.

Pada era otonomi daerah ini asumsi awal melihat besarnya angka putus sekolah adalah situasi kemiskinan yang melilit kemampuan penduduk ataupun pemerintah suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Fakta menunjukkan, provinsi dengan tingkat pendapatan rendah cenderung memiliki angka putus sekolah yang juga tinggi. Papua Barat, Sulawesi Barat, Maluku, Gorontalo, dan Maluku Utara pada tahun 2007 termasuk dalam lima provinsi yang memiliki nilai produk domestik regional bruto (PDRB) terendah di antara 28 provinsi yang lain. Kecuali Maluku yang mencatat angka 1,45 persen, putus sekolah SD di empat wilayah lain mencapai 3-5 persen. Di tingkat SMP angkanya lebih tinggi lagi, yaitu 2-7 persen. Kekurangberdayaan secara ekonomi di provinsi-provinsi tersebut memengaruhi kelangsungan pendidikan di wilayahnya. Dengan pendapatan per kapita per tahun Rp 3 juta hingga Rp 5 juta, total anak putus sekolah SMP di lima provinsi tersebut hampir mencapai 10.000 anak, sementara lebih dari 31.000 siswa SD juga mengalami putus sekolah. Namun, kemiskinan rupanya tidak selalu menjadi satu-satunya penyebab. Paling tidak, jika mencermati nilai PDRB setiap provinsi di Indonesia, tampak jika wilayah yang "kaya" belum tentu lebih unggul dalam angka putus sekolah. Ambil contoh DKI Jakarta yang merupakan provinsi "terkaya" dengan nilai PDRB mencapai Rp 563,8 triliun pada tahun 2007. Jakarta berada di atas rata-rata nilai PDRB nasional yang sebesar Rp 96 triliun. Namun, sayang, penuhnya pundi uang yang dimiliki

Jakarta belum berhasil menurunkan angka putus sekolah di provinsi yang juga menjadi ibu kota negara ini. Pada tahun ajaran 2005/2006 hingga 2006/2007 angka putus sekolah SD di Jakarta masih menyentuh angka 1,78 persen. Persentase ini bahkan lebih tinggi dari beberapa provinsi lain dengan pendapatan regional jauh di bawah Jakarta, seperti Sulawesi Tenggara (1,37 persen) dan DI Yogyakarta (1,21 persen).

Fakta di lapangan terjadi ketidakmerataan pendidikan di Indonesia. Di wilayah-wilayah yang secara geografis sangat luas dan aksesnya terbatas, seperti wilayah-wilayah pedalaman, untuk mencapai sekolah yang berjarak puluhan kilometer tentu bukan perkara mudah. Jika kondisi transportasi wilayah memang sulit dan memakan biaya besar, bisa dipastikan putus sekolah bagi si anak tinggal menunggu waktu. Data menunjukkan bahwa sebagian kasus putus sekolah banyak terjadi di wilayah-wilayah yang secara geografis masih kesulitan sarana transportasi. Beberapa provinsi yang wilayahnya luas seperti yang ada di Indonesia bagian timur dan beberapa di bagian barat masih memiliki kendala transportasi seperti ini. Misalnya, Maluku dan Papua yang memiliki luas wilayah kabupaten dan kota rata-rata ribuan hingga puluhan ribu kilometer persegi. Meski wilayahnya sangat luas, jumlah sekolah yang ada terbatas. Dampaknya, persebaran pun tidak merata. Setelah faktor ekonomi dan faktor teknis, pandangan sosiokultural keluarga dan masyarakat tentang penting atau tidaknya sekolah juga kerap kali menentukan keberlangsungan nasib siswa dalam melanjutkan pendidikan (http://pakguruonline.pendidikan.net/otonomi_pendidikan.html).

Selain masalah ketidakmerataan, selama ini paradigma pendidikan masih berorientasi pada kecerdasan kognitif, belum sampai pada afeksi bahkan konatif. Berbeda dengan pendidikan di luar negeri yang menekankan pada *problem lesson*, di Indonesia masih menekankan *content lesson*, pendidikan yang lebih berfokus pada isi. *Problem lesson* yang dimaksudkan adalah pelajaran yang menekankan pada penyelesaian permasalahan yang ada pada masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar penambahan fasilitas pendidikan tanpa disertai perubahan paradigma.

Kelulusan juga ditentukan oleh standar nilai minimal, hal ini juga menimbulkan masalah baru, bukan tentang standar nilai itu mempersulit atau mempermudah, tetapi adalah kemampuan siswa itu untuk mencapai standar tersebut. Pemerintah pusat seharusnya tidak menetapkan standar ganda. Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bahwa gurulah yang berhak memberikan penilaian keberhasilan peserta didik. Namun seperti kita ketahui bersama ternyata pemerintah menentukan standar kelulusan siswa melalui Ujian Nasional. Cukupkah keberhasilan siswa selama tiga tahun hanya ditentukan dengan melihat hasil ujian selama tiga hari? Pemerintah harus introspeksi, bukankah standar ganda itu melanggar Undang-undang?

Pemerintah Daerahpun banyak yang hanya melihat bahwa prosentase kelulusan UAN sebagai prestise daerah. Fenomena ketakutan dianggap sebagai daerah tertinggal sangat menghantui para pemimpin daerah, bahkan kalau kita simak beberapa saat lalu ada kepala daerah yang mengancam akan

memutasi Kepala Sekolah jika banyak siswa yang tidak lulus, sehingga seringkali dalam pelaksanaan Ujian Akhir Nasional terjadi penyimpangan-penyimpangan dan kecurangan-kecurangan yang bertujuan tidak lain untuk mengejar target kelulusan.

Pada hakekatnya manusia dilahirkan dalam potensi yang berbeda-beda. Oleh karenanya mekanisme pengembangan karakter dan kemampuan yang dapat dilakukan di lembaga pendidikan seyogyanya harus memiliki bentuk keberagaman baik dari segi akademik maupun non akademik. Di sisi lain adanya keanekaragaman potensi daerah telah mengharuskan ditumbuhkembangkannya model pendidikan yang dapat menggali kekayaan di sekitar lembaga pendidikan itu berdiri. Untuk itu momentum desentralisasi pendidikan saat ini hendaknya dioptimalkan secara positif semata-mata untuk memberikan ketepatan pelaksanaan pendidikan yang dilandasi oleh kepentingan pengembangan keberagaman potensi sumber daya manusia dan alam setiap daerah. Desentralisasi pendidikan di Indonesia mengacu pada pemerintahan daerah kabupaten/kota. Tujuan diberlakukannya desentralisasi adalah terwujudnya pemerataan kesempatan pendidikan dengan tercapainya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, adanya pengembangan keberagaman potensi peserta didik dan lingkungan dalam konteks kurikulum diversifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat, meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan, serta sistem penyelenggaraan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu desentralisasi merupakan program peningkatan tanggung jawab yang lebih

besar untuk pemerintahan tingkat provinsi dan kabupaten dalam mencapai tujuan-tujuan Pendidikan Untuk Semua (PUS). Aspek desentralisasi pendidikan meliputi substantif, yaitu pengaturan tentang tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan administratif, di sisi lain adalah aspek fungsi manajemen yang ditempuh melalui mekanisme partisipasi masyarakat. Pengembangan konsepsi desentralisasi pendidikan di Indonesia dikemas dalam progra pendidikan *School Based Management* (MBS) dan *School Based Community* (MBM).

Sekolah Alternatif merupakan suatu konsep proses pendidikan yang berupaya mengakomodasi tujuan-tujuan pendidikan sesuai dengan hakikat pendidikan yaitu mengembangkan potensi manusia sesuai dengan keunikan dan keberagamannya. Di Indonesia sendiri sekolah alternatif telah banyak ditemukan keberadaannya dan disambut baik oleh sebagian masyarakat yang berpandangan bahwa pendidikan tidak harus serta merta dilaksanakan di dalam gedung sekolah, dan pada hakikatnya pendidikan yang berkualitas tidak harus mahal dan dalam kenyataannya dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Konsep yang diusung oleh sekolah-sekolah alternatif di Indonesia ini sejalan dengan pemikiran tokoh pendidikan besar Ivan Illich dalam buku *Kebijakan Pendidikan* yang mengatakan bahwa sekolah bukan penjara bagi peserta didiknya, namun sekolah adalah tempat untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan keunikan dan keberagamannya. (Tilaar, 2007:93)

Ada beberapa konsep sekolah alternatif yang sedang berkembang di Indonesia diantaranya adalah konsep sekolah alternatif *Home Schooling* yaitu

sebuah konsep sekolah alternatif yang dalam pelaksanaan proses pendidikannya menggunakan media teknologi yang berbasis internet. Konsep sekolah alternatif yang lainnya adalah sekolah alam. Adapun sekolah alternatif yang bentuknya sekolah kejar paket A yaitu sekolah yang setara dengan sekolah dasar (SD), sekolah kejar paket B yaitu sekolah yang setara dengan sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah kejar paket C yaitu sekolah yang setara dengan sekolah menengah atas (SMA). Selain itu terdapat berbagai bentuk sekolah alternatif yang didirikan dengan konsep berbeda-beda dan pelaksanaannya juga beragam, misalnya rumah singgah yang diperuntukkan bagi anak jalanan.

Sekolah alternatif muncul akibat dari timbulnya kebutuhan-kebutuhan peserta didik yang tidak bisa dipenuhi oleh sekolah formal dan juga karena mahalnya biaya pendidikan di sekolah formal yang tidak bisa dipenuhi oleh para peserta didik. Selain itu beberapa sekolah alternatif muncul sebagai upaya untuk mengembalikan tujuan pendidikan pada tujuan semula yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke empat yang menyatakan bahwa tujuan dari negara kita salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pendidikan adalah hak dari setiap warga negara.

Sekolah Qoryah Thoyyibah di Desa Kalibening Salatiga adalah salah satu bentuk sekolah alternatif yang berbasis komunitas yang dalam prakteknya mengembalikan hakikat pendidikan pada tujuan semula yaitu

membentuk manusia yang sesuai dengan karakteristik, kemampuan dan minatnya masing-masing. Sekolah ini bukanlah sekolah-sekolah formal seperti kebanyakan sekolah yang ada. Sekolah yang didirikan untuk menampung para anak-anak dari orang tua yang mengalami kesulitan ekonomi tetapi mempunyai semangat untuk mengenyam pendidikan ini merupakan sekolah terbuka yang mempunyai segudang catatan prestasi yang luar biasa. Bukan sekolah terbuka yang hanya cenderung sebagai lembaga pembagi-bagi ijazah, tetapi di sekolah ini semua warganya selalu berusaha mengelola proses pendidikannya secara serius. Di sekolah ini para siswa belajar menurut apa yang mereka sukai dan inginkan. Sebagai mana nama program yang digalakkan oleh pemerintah adalah program wajib belajar, dengan pemahaman bahwa kata belajar tidak sebatas hanya di dalam gedung sekolah, dan tidak ada kata terlambat untuk belajar.

Berangkat dari beberapa masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis melakukan analisa tentang konsep dan strategi yang dilakukan oleh Sekolah Alternatif Qoryah Thoyyibah di Desa Kalibening Salatiga di Desa Kalibening Salatiga sebagai wujud Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun mempunyai tujuan yang mulia diantaranya adalah pendidikan untuk semua, namun dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa kendala dan masalah. Melalui uraian diatas berikut masalah yang dapat diidentifikasi:

Masalah Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun secara umum:

1. Masih tingginya angka putus sekolah. dan ketidakmerataan pendidikan di Indonesia.
2. Paradigma pendidikan masih berorientasi pada kecerdasan kognitif, belum sampai pada afeksi bahkan konatif.

Masalah Pelaksanaan Konsep dan Strategi Sekolah Alternatif Qoriyah Thoyibah dalam mewujudkan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun:

1. Masih kurangnya dukungan dari Pemerintah Daerah Kota Salatiga dalam pelaksanaan konsep dan strategi Sekolah Alternatif Qoryah Thoyyibah sebagai wujud pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun.
2. Paradigma masyarakat yang sebagian besar masih keliru memandang konsep dan strategi yang ditawarkan oleh Sekolah Alternatif Qoryah Thoyyibah di Desa Kalibening Salatiga.

Dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisis konsep dan strategi pendidikan yang dilakukan oleh Sekolah Alternatif Qoryah Thoyyibah di Desa Kalibening Salatiga dalam melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar

dengan konsep dan strategi yang berbeda dibandingkan dengan sekolah formal lainnya. Melalui pembatasan masalah tersebut maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana penerapan konsep dan strategi pendidikan Sekolah Alternatif Qoryah Thoyyibah di Desa Kalibening Salatiga dalam memecahkan masalah pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun?”

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisa konsep dan strategi Sekolah Alternatif Qoryah Thoyyibah di Desa Kalibening Salatiga di Desa Kalibening Salatiga dalam melaksanakan program Wajib Belajar 9 Tahun.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi kekuatan, peluang, aspirasi dan indikator keberhasilan dalam pelaksanaan konsep dan strategi Sekolah Alternatif Qoryah Thoyyibah di Desa Kalibening Salatiga di Desa Kalibening Salatiga dalam melaksanakan program Wajib Belajar 9 Tahun.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti

Penelitian ini berguna untuk mengaplikasikan keilmuan yang telah didapat dalam masa studi khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan dan

prakteknya di lapangan, dalam hal ini adalah pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

2. Bagi pihak lain

a. Bagi Pemerintah dan *stakeholder* pendidikan diharapkan penelitian ini memberikan gambaran tentang pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di lapangan serta memberikan masukan dalam membuat kebijakan pendidikan khususnya yang menyangkut program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

b. Bagi masyarakat umum penelitian ini diharapkan memacu partisipasi aktif dalam proses pendidikan, baik sebagai pemberi pertimbangan, pendukung pendidikan, dan mediator antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan pendidikan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hakikat Pendidikan

Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaannya. Dengan demikian, bagaimanapun sederhananya peradaban suatu masyarakat, di dalamnya terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan. Karena itulah sering dinyatakan pendidikan telah ada sepanjang peradaban umat manusia. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia melestarikan hidupnya. Pendidikan menurut pengertian Yunani adalah “pedagogik” yaitu ilmu menuntun anak, orang Romawi memandang pendidikan sebagai “educare”, yaitu mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai “Erziehung” yang setara dengan educare, yakni membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan/potensi anak. Dalam bahasa Jawa pendidikan berarti panggulawentah (pengolahan), mengolah, mengubah, kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran dan watak, mengubah kepribadian sang anak. Sedangkan menurut Herbart pendidikan merupakan pembentukan peserta didik kepada yang diinginkan sipendidik yang diistilahkan dengan Educere. (M.R. Kurniadi,STh;1) Dalam kamus besar Bahasa Indonesia,

pendidikan berasal dari kata dasar “didik” (mendidik), yaitu memelihara dan memberi latihan (ajaran pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran sedangkan pendidikan mempunyai pengertian proses perubahan dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perluasan, dan cara mendidik. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.

Tinjauan Etimologis

Istilah pendidikan, menurut Carter V. Good dalam “Dictionary of Education” dijelaskan sebagai berikut:

a. Pedagogy

1. *The art, practice of profession of teaching*

“seni, praktik atau profesi sebagai pengajar (pengajaran)”

2. *The sistemized learning or instruction concerning principles and methods of teaching and of student control and guidance; lagerly replaced by the term of education.*

“Ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan metode-metode mengajar pengawasan dan bimbingan murid dalam arti luas diartikan dengan istilah pendidikan”

b. Education:

1. Proses perkembangan pribadi;
2. Proses sosial;
3. *Profesional cources;*

4. Seni untuk membuat dan memahami ilmu pengetahuan yang tersusun yang diwarisi/dikembangkan generasi bangsa.

Tinjauan Terminologis

Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Lebih lanjut beliau (Kerja Ki Hajar Dewantara 1962:14) menjelaskan bahwa “Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intellect) dan tubuh anak; dalam pengertian Taman Siswa tidak boleh dipisah-pisahkan bagian-bagian itu, agar supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya “.

Beliau lebih lanjut menjelaskan bahwa pendidikan harus mengutamakan aspek-aspek berikut:

1. Segala alat, usaha dan cara pendidikan harus sesuai dengan kodratnya keadaan.
2. Kodratnya keadaan itu tersimpan dalam adat-istiadat setiap rakyat, yang oleh karenanya bergolong-golongan merupakan kesatuan dengan sifat prikehidupan sendiri-sendiri, sifat-sifat mana terjadi dari bercampurnya semua usaha dan daya upaya untuk mencapai hidup tertib damai.
3. Adat istiadat, sebagai sifat perikehidupan atau sifat percampuran usaha dan daya upaya akan hidup tertib damai itu tiada terluput dari pengaruh zaman dan tempat.; oleh karena itu tidak tetap senantiasa berubah.

4. Akan mengetahui garis-hidup yang tetap dari sesuatu bangsa perlulah kita mempelajari zaman yang telah lalu.
5. Pengaruh baru diperoleh karena bercampurnya bangsa yang satu dengan yang lain,percampuran mana sekarang ini mudah sekali terjadi disebabkan adanya hubungan modern.Haruslah waspada dalam memilih mana yang baik untuk menambah kemuliaan hidup kita dan mana yang akan merugikan. Itulah diantara pikiran- pikiran beliau yang sangat sarat dengan nilai

Pendidikan merupakan *transfer of knowledge, transfer of value dan transfer of culture and transfer of religius* yang semoga diarahkan pada upaya untuk memanusiakan manusia. Hakikat proses pendidikan ini sebagai upaya untuk mengubah perilaku individu atau kelompok agar memiliki nilai-nilai yang disepakati berdasarkan agama, filsafat, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Menurut pandangan Paula Freire pendidikan adalah proses pengaderan dengan hakikat tujuannya adalah pembebasan. Hakikat pendidikan adalah kemampuan untuk mendidik diri sendiri.

B. Hakikat Manusia

Pandangan mengenai hakikat manusia dapat dibedakan dalam dua aliran besar yaitu aliran idealisme spiritualisme dan materialisme. Hakikat manusia menurut pandangan kaum idealisme spiritualisme melihat kemampuan yang besar dari ide, seperti yang diungkapkan oleh Frederich Hegel. Hakikat kehidupan manusia ditentukan oleh peraturan antara ide-ide yang saling berlawanan. Dari suatu ide atau thesis bertentangan dengan ide yang lain atau anti-thesis dan melahirkan ide pada tingkat yang lebih tinggi atau sintesa yang berakhir pada ide absolut.

Manusia paripurna adalah perwujudan dari ide yang absolut itu. Ide absolut itu dapat berupa negara, dapat berupa maha pencipta, dapat pula berupa insan kamil. Akan tetapi, manusia adalah manusia yang serba terbatas yang tidak akan pernah mencapai ide absolut itu. Sebaliknya paham materialisme melihat manusia itu tidak lebih dari bagian alam mikro yaitu bagian dari alam materi yang melihat hal yang realistis yang dapat diraba dan dapat dibentuk dengan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Salah satu kekuatan yang membentuk manusia adalah kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu kekuatan yang membentuk manusia adalah kekuatan-kekuatan ekonomi yang tersembunyi di dalam kelas-kelas dalam masyarakat. Oleh sebab itu, berbagai ungkapan manusia yang disebut kebudayaan atau agama merupakan produk dari kelas-kelas di dalam masyarakat. (Tilaar, 2007:22-23)

Tugas pendidikan ialah menyadari akan adanya kepincangan-kepincangan di dalam masyarakat yang diakibatkan oleh kekuatan-kekuatan tersebut, sehingga tugas pendidikan ialah merombak kelas-kelas artifisial yang dikonstruksikan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi di dalam masyarakat untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas. Kesimpulan sementara mengenai hakikat manusia adalah:

1) Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dapat mewujudkan kemanusiaannya.

Berbeda dengan dunia binatang karena manusia itu adalah makhluk yang memerlukan pendidikan. Tanpa pendidikan manusia tidak mungkin menjadi manusia atau mewujudkan kemanusiaannya. Inilah ungkapan manusia sebagai *animal educandum*.

2) Manusia adalah *animal educabili*.

Hal ini berarti bahwa manusia itu mempunyai potensi untuk dididik atau dikembangkan. Apabila manusia itu dilahirkan sudah sempurna maka manusia tidak lagi memerlukan pendidikan. Manusia diciptakan oleh Maha Pencipta dengan segala kesempurnaannya tetapi juga dilahirkan di dalam berbagai kelemahannya sebagai manusia, oleh sebab itu ia memerlukan pendidikan untuk mewujudkan kemanusiaannya sebagai potensi

3) Manusia adalah makhluk sosial.

Proses pendidikan merupakan suatu proses interaksi interpersonal dan oleh sebab itu proses pendidikan adalah proses dalam tataran sosial. Di dalam kaitan ini proses pendidikan yang bertujuan hanya untuk melahirkan pekerja-pekerja yang handal tetapi tanpa etika karena hanya untuk mengejar

keuntungan-keuntungan semata bukanlah proses pendidikan yang sebenarnya. Selanjutnya, manusia mengasumsikan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Seorang anak manusia tidak dapat mewujudkan kemanusiaannya apabila dia dalam keadaan soliter atau terlepas dari masyarakatnya. Dalam hal ini, pendidikan tidak terjadi di dalam ruangan maya tetapi di dalam dialog antar manusia.

4) Proses pendidikan terjadi dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya. Kebudayaan manusia merupakan hasil interaksi dari anggota masyarakatnya yang kemudian diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya dengan proses perubahannya.

5) Apabila hakikat manusia sebagai makhluk manusia yang dididik, yang mempunyai potensi untuk dididik maka secara implisit terdapat pengakuan adanya kemampuan manusia untuk menjadi pendidik.

Proses pendidikan bukan suatu proses satu arah tetapi suatu proses dua arah antara pendidik dan peserta didik. Tugas pendidik adalah tugas yang paling tua di dunia ini sebagaimana tugas seorang ibu sebagai pendidik yang utama bagi anak-anaknya. Jadi hakikat manusia bukan hanya sebagai *animal educandum*, *animal educabili*, tetapi juga sebagai *animal edukator*.

Demikianlah secara ringkas hakikat manusia dan hakikat proses pendidikan yang hanya terjadi dalam dunia manusia karena manusia itu adalah makhluk yang dididik, yang dapat dididik, dan yang mendidik sesamanya.

C. Hakikat Manusia dan Proses Pendidikan

Berdasarkan pandangan mengenai hakikat manusia yang berbeda-beda lahirilah berbagai rumusan tentang tujuan proses pendidikan itu. Tujuan yang akan dicapai melalui kebijakan-kebijakan tertentu yang terkait dengan itu adalah kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan tersebut menyangkut beberapa hal antara lain

1) Pendidikan sebagai Transmisi Kebudayaan

Pandangan ini sangat umum dan populer di dalam suatu masyarakat tradisional. Seperti yang terjadi di dalam masyarakat tradisional yang belum mengenal lembaga pendidikan sekolah, pendidikan terjadi di dalam lingkungan keluarga dan di dalam lingkungan masyarakatnya yang terbatas. Proses pendidikan dinilai sebagai proses menstransmisikan nilai-nilai budaya yang telah terakumulasi dari satu generasi ke generasi lainnya.

2) Pendidikan sebagai Pengembangan Kepribadian

Proses pendidikan sebagai pengembangan kepribadian mencakup upaya yang sangat luas. Terdapat banyak teori mengenai kepribadian, strukturnya, pengembangannya, tujuannya dan sebagainya sehingga proses pendidikan sebagai pengembangan kepribadian mencakup berbagai upaya yang luas sehingga kehilangan fokusnya. Barangkali yang lebih tepat adalah pengembangan kepribadian seseorang sesuai dengan bakat yang dimilikinya sehingga dengan bakat itu dapat menyumbangkan secara

optimal kemampuannya untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat bangsanya.

3) Pendidikan sebagai Pengembangan Akhlak Mulia serta Religius.

Dalam lembaga pendidikan baik formal, non formal dan informal, pengembangan akhlak mulia dan religius tentu saja menempati salah satu tugas dari lembaga itu. Namun demikian, lembaga-lembaga pendidikan di dalam masyarakat modern terutama ditujukan untuk pengembangan pribadi mandiri dalam dalam berbagai aspek kepribadiannya termasuk memiliki kepribadian dengan akhlak mulia dan religius. Terlebih lagi dalam negara yang berdasarkan Pancasila yang menempatkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai etika lainnya. Oleh sebab itu pengembangan religius dan akhlak mulia menempati tempat yang khusus dalam pendidikan nasional. Dalam kaitan ini dapat dibedakan antara pendidikan religius dan pendidikan budi pekerti. Pendidikan religius sangat erat kaitannya dengan pendidikan agama tertentu, sedangkan pendidikan budi pekerti sifatnya lebih umum berkaitan dengan nilai-nilai universal dari manusia yang beradab. Tugas pendidikan adalah untuk mengembangkan pribadi yang bersusila, dan beradab sebagai anggota dalam masyarakatnya, masyarakat sekitarnya, masyarakat etnisnya, masyarakat bangsanya yang berbhineka dan sebagai anggota dari masyarakat manusia yang beradab.

4) Pendidikan sebagai Pengembangan Warga Negara yang Bertanggungjawab.

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Negara melindungi dan memfasilitasi perkembangan individu sepenuhnya. Ini adalah tanggung jawab negara. Sebaliknya, setiap warga negara mempunyai tanggung jawab untuk memelihara ketertiban di dalam masyarakat sehingga negara dapat melaksanakan fungsinya dalam melindungi serta memfasilitasi perkembangan warganegaranya termasuk penyelenggaraan pendidikan yang dibutuhkan oleh warga negaranya.

Warga negara bukan hanya dapat tetapi boleh dan harus menuntut negara untuk melindungi hak-hak asasi kemanusiaannya. Oleh sebab itu, setiap warga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjadi warga negara yang baik seperti membayar pajak, mematuhi Undang-Undang, menghormati simbol-simbol negara sebagai kesepakatan bersama di dalam hidup bersama sebagai masyarakat bangsa.

5) Pendidikan sebagai Mempersiapkan Pekerja-pekerja yang Terampil dan Produktif

Pendidikan telah menjadi identik dengan pelatihan dan dengan demikian pendidikan dikuasai dengan falsafah pragmatisme. Menurut pandangan ini manusia diciptakan untuk bekerja. Tanpa bekerja, orang tidak akan hidup. Hidup adalah bekerja dan bekerja adalah hidup. *Workaholic* adalah sosok ideal dalam masyarakat modern. Namun demikian, manusia dilahirkan bukan untuk bekerja melainkan bekerja untuk hidup. Bekerja merupakan suatu pengabdian terhadap kehidupan yang lebih baik dan bukan merupakan budak dari eksistensi manusia itu

sendiri. Jika demikian, pekerjaan menempati tempat yang sangat terhormat dalam kehidupan manusia karena di dalam pekerjaan itulah dapat disumbangkan berbagai kemampuan, talenta, kreativitas manusia untuk pengembangan dirinya dan kemaslahatan orang banyak. Di sinilah letak nilai dari suatu pekerjaan atau nilai dari keberadaan dan kehidupan seseorang dalam masyarakatnya.

Pekerjaan bukanlah tujuan akhir dari kehidupan manusia tetapi sebagai sarana dari perwujudan kemanusiaan seseorang. Masing-masing orang dikaruniai talenta dan dengan talenta itu manusia dapat mewujudkan kemanusiaannya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk sesamanya. Manusia yang merdeka adalah manusia yang mengembangkan keberadaannya melalui pekerjaan yang dimilikinya sehingga dia sepenuhnya mengabdikan dirinya bagi penyempurnaan kehidupan pribadinya dan juga sebagai anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab.

Pendidikan untuk pekerjaan merupakan sesuatu yang mulia apabila ditujukan kepada pembebasan manusia. Manusia yang dikembangkan untuk menguasai suatu pekerjaan adalah mengembangkan kreativitas seseorang. Pendidikan untuk memiliki pekerjaan bukan melahirkan robot-robot sebagai suatu bagian dari mesin raksasa dalam suatu industri tetapi manusia-manusia bebas yang kreatif yang dapat menciptakan berbagai perubahan sehingga dengan demikian, ia menjadi salah satu dari *agent of change* di dalam masyarakat modern yang tetap bebas dan kreatif.

Manusia yang bebas dan kreatif tidak akan membentuk suatu kelompok yang eksklusif seperti pembentukan kelas-kelas pekerja dalam teori Marxisme tetapi manusia-manusia sebagai pribadi yang independen penuh kreativitas yang terus maju ke depan. Ini adalah sosok pribadi yang demokratis dan dapat mengembangkan masyarakat yang demokratis.

6) Pendidikan adalah Pengembangan Pribadi Paripurna atau Seutuhnya

Pertama-tama ialah kenyataan bahawa tidak ada manusia atau pribadi yang sempurna. Manusia diciptakan dan dilahirkan dengan karunia dan bakat yang berbeda-beda. Tidak ada dua manusia yang sama meskipun kembar satu sel pun melahirkan dua pribadi yang berbeda. Keragaman manusia merupakan tanda kemerdekaan manusia. Apabila semua manusia di dunia ini sama maka tidak akan muncul dan berkembang apa yang disebut kreativitas dan kemajuan. Manusia hanyalah sekedar robot-robot yang dihasilkan oleh suatu mesin raksasa seperti yang digambarkan oleh George Orwell dalam novelnya yang terkenal 1984 “Kenyataannya manusia diciptakan menurut harkatnya masing-masing. Oleh sebab itu, dia bertanggungjawab untuk mengembangkannya bagi dirinya sendiri dan bagi sesamanya.

Pengembangan manusia atau pengembangan kepribadian manusia seutuhnya akan lebih tepat apabila dikatakan “pengembangan pribadi sebagaimana adanya”. Karena keberadaan manusia adalah keberadaan dalam keragaman maka pengembangan kepribadian manusia lebih menitikberatkan pada kreativitas manusia dan bertanggung jawab pada

kehidupannya. Pendidikan manusia seutuhnya atau pendidikan kepribadian paripurna lebih mengasumsikan kepada keseragaman manusia yang bertentangan dengan keragaman manusia. Oleh sebab itu proses pendidikan yang menyamaratakan manusia seperti misalnya di dalam kebijakan Ujian Akhir Nasional didasarkan kepada keseragaman manusia.

7) Pendidikan sebagai Proses Pembentukan Manusia Baru

Pemahaman tentang pendidikan sebagai pembentukan manusia baru dipahami dari fakta bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang melekat pada setiap kehidupan bersama dan berjalan sepanjang perjalanan umat manusia. Jhon Dewey mengemukakan bahwa pendidikan dapat dipahami sebagai sebuah upaya konservatif dan progresif dalam bentuk pendidikan sebagai pendidikan formasi, sebagai rekapitulasi dan retrospeksi dan sebagai rekonstruksi (Dewey, 1964:69-77)

Michael Rutz mengemukakan bahwa pendidikan berawal dari fakta bahwa manusia memiliki kekurangan, atau dalam bahasanya disebut defisit, karenanya pendidikan merupakan jawaban untuk membuatnya lengkap. Dikatakan juga karena setiap pribadi selalu mempunyai defisit maka pendidikan adalah suatu proses keompensatoris yang dapat membantu anak didik untuk sedapat-dapatnya menutupi defisit tersebut. Rhenischer Merkur. Jan (2000:21)

Pemahaman ini dekontekskan dengan upaya-upaya pembangunan, khususnya dalam konteks pembangunan di negara berkembang untuk mengejar ketinggalannya. Dari berbagai ragam definisi tentang pembangunan,

salah satu definisi yang memadai adalah definisi PBB yang endefinisikan pembangunan sebagai sebuah upaya atau proses dinamis tanpa akhir. Disebutkan dalam dokumennya bahwa “*development is not a static concept. It is continuously changing*”. Pemikiran ini sebangun dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Rektor Universitas PBB, Soejatmiko yang mendefinisikan pembangunan sebagai sebuah proses pembelajaran dari satu kehidupan ke satu kehidupan yang lebih baik. Pembangunan bukan dilakukan melalui berbagai tindakan atau melalui keahlian-keahlian yang diperoleh, melainkan sebagai suatu yang dipelajari. Belajar, dalam arti di sini adalah peningkatan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun secara kolektif, tidak hanya menyesuaikan diri dengan perubahan menuju tujuan-tujuan masyarakat. (Soejatmiko ed. (1997:50))

Dari berbagai pendapat diatas mengenai pendidikan sebagai proses pembentukan manusia baru, dalam penelitian ini penulis sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Jhon Dewey dimana dikemukakan bahwa pendidikan dapat dipahami sebagai sebuah upaya konservatif dan progresif dalam bentuk pendidikan sebagai formasi, sebagai rekapitulasi dan retrospeksi, dan sebagai rekontruksi. Sejalan dengan pendapat Jhon Dewey penulis juga sepakat dengan apa yang telah dikemukakan oleh Rutz bahwa pendidikan berawal dari kenyataan manusia memiliki kekurangan, atau dalam bahasanya disebut defisit, karenanya pendidikan merupakan jawaban untuk membuatnya lengkap.

D. Pendidikan sebagai Proses Pemberdayaan

Proses pendidikan merupakan suatu proses perbantua pada peserta didik agar dapat berkembang sepenuhnya sesuai dengan bakat serta kemampuan yang dimilikinya. Seperti telah dijelaskan manusia dilahirkan tak berdaya karena dia tergantung kepada tuntutan-tuntutan biologis yang disediakan oleh orangtuanya dan oleh lingkungan alamiahnya. Makhluk yang tak berdaya itu pula secara intelektual dan emosional merupakan makhluk yang perlu dibimbing agar dia dapat berkembang sehingga dia dapat menguasai perkembangan dirinya dan alam sekitarnya untuk kepentingannya sendiri. Eksplorasi terhadap dirinya serta alam sekitarnya maupun dengan sesama manusia membantu perkembangan dirinya agar dia dapat berdiri sendiri dan memberdayakan dirinya sendiri atas tanggung jawabnya sendiri. Inilah yang disebut proses pemberdayaan dari anak manusia, dari makhluk yang tidak berdaya menjadi makhluk yang independen serta kreatif sehingga dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain serta terhadap Tuhannya.

Proses pemberdayaan peserta didik berarti menghormati keberdirisendirian dari pribadi manusia yang disebut peserta didik dan bukan merampas hak-hak dasarnya dan martabat seseorang peserta didik sebagai sesama manusia. Disinilah terletak nilai-nilai etis dari proses pendidikan, bahwa antara pendidik dan peserta didik terdapat hubungan tanggung jawab yang sifatnya etis. Pendidik mengabdikan seluruh kepribadiannya untuk kepentingan peserta didik serta pihak peserta didik secara lambat laun sesuai

dengan tingkat perkembangannya akan mengambil alih tanggung jawab itu oleh dirinya sendiri. Relasi memberi dan menerima tanpa pamrih ini benar-benar merupakan suatu tindakan etis dalam relasi antara pendidik dan peserta didik, antara orang tua dan anak.

Dibawah ini akan penulis sajikan beberapa pendapat mengenai pendidikan sebagai proses pemberdayaan peserta didik dari beberapa tokoh baik dalam negeri maupun luar negeri yang berlatar belakang sebagai ahli pendidikan:

1) Ki Hadjar Dewantara

“Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Manusia merdeka yaitu manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada oranglain akan tetapi berdasar atas kekuatan sendiri” (Dewantara, 1928:3).

Ki Hadjar Dewantara mendirikan Perguruan Nasional Tamansiswa. Ada tiga asas yang merupakan roh dari perguruan tersebut a) Asas kemandirian manusia. b) Asas sistem among yang merupakan habitus dari perkembangan prinsip kemandirian. c) Habitus budaya termasuk lingkungan alamiah di mana terjadi perwujudan kemandirian dan sistem among tersebut. Penjelasan dari asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

a) Asas Kemandirian

(1) Manusia pada dasarnya merupakan makhluk yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas eksistensinya. Inilah asas *serah but the seeking rehet* yaitu asas untuk mengatur diri sendiri, bertanggung jawab atas keberadaannya sendiri tanpa tergantung kepada orang lain. Hal ini juga mengimplikasikan bahwa seseorang tidak mempunyai hak untuk merampas kemandirian orang lain. Hak untuk menjadi diri sendiri ini tidak lain adalah erwujudan dari identitas seseorang. Namun demikian identitas seseorang tidak dapat terwujud tanpa sesama yang lain atau dalam relasi dengan sesamanya. Relasi antar manusia berarti suatu relasi dari berbagai identitas dan berbagai kemungkinannya. Perkembangan serta terbentuknya identitas seseorang dalam relasi sesamanya hanya dapat terjadi dalam hubungan interpersonal yang tertib dan damai. Tidak mungkin dalam kondisi yang serba bermusuhan serta kecurigaan atau tidak adanya *trust* di dalam interaksi sesama manusia itu akan terbentuk identitas seseorang. Dalam suasana damai dapat terjadi saling membantu, saling pengertian, saling mengisi, dan saling bertanggung jawab untuk perkembangan pribadi dan perkembangan masyarakat pada umumnya. Identitas seseorang mengimplikasikan adanya identitas sesama yang lain di dalam suasana saling menghormati dan saling menghargai. Dalam kondisi saling mencurigai bahkan saling bermusuhan tidak mungkin terjadi pembentukan dan perkembangan identitas seseorang.

b) Sistem Among

Prinsip kemandirian dalam proses pendidikan dikembangkan dalam sistem among. Among atau *ngemong* mempunyai arti yang sangat dalam di dalam proses pendidikan yang berkaitan dengan hakikat manusia yang tidak berdaya ketika dilahirkan. Namun demikian ketidak berdayaan manusia merupakan suatu proses yang tertuju ke arah kemandirian. Hal ini berarti dalam sistem among relasi antara pendidik dan peserta didik bukanlah suatu relasi salaiig ketergantungan, tetapi suatu relasi yang semakin lama semakin memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berdiri sendiri. Sistem among bukan berarti suatu sistem perintah dari atas atau embiarkan peserta didik mencari jalannya sendiri. Dengan demikian pendidikan bukanlah suatu proses totaliter atau kemerdekaan tanpa batas, tetapi proses pemandirian yang bertahap sesuai dengan perkembangan pribadi peserta didik.

Sistem among mempunyai implikasi di dalam relasi antara pendidik dan peserta didik. Pendidik bukanlah sorang diktator atau yang haus kekuasaan atau kehormtan pribadi, tetapi dengan satu visi yang sevara sukarela dan penuh dedikasi dalam membantu peserta didik untuk menemukan dirinya sendiri atau dapat berdiri sendiri atas kemampuannya sendiri. Inilah prinsip among yng menuju kemandirian yang memerlukan dedikasi seorang pendidik.

c) Prinsip Kebudayaan

Proses pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantara (1928:30) “pendidikan terjadi di dalam habitus yang sentripetal artinya yang berpusat dari budaya lokal dan berangsur-angsur meningkat kepada lingkungan semakin luas sampai pada budaya nasional bahkan budaya global” inilah prinsip yang modern dari Tamansiswa yang sejak semula telah mengenal prinsip-prinsip multikultural yang marak pada abad XXI ini. Tamansiswa telah menunjukkan pentingnya pengembangan identitas manusia yang berakar dari keluarga serta budaya lokal sehingga hubungan personal antar manusia yang konkret merupakan dasar dari terbentuknya identitas seseorang, identitas etnis dan identitas bangsa Indonesia.

Ketiga prinsip proses pendidikan Tamansiswa diatas merupakan ruh Tamansiswa yang menghargai akan nilai-nilai luhur kemanusiaan yaitu manusia yang berdiri sendiri, yang didalam perkembangannya memerlukan bantuan orang lain yaitu pendidik yang bukan untuk mendominasikannya tetapi yang membantunya agar menjadi pribadi yang berdiri sendiri, mandiri dan bertanggung jawab. Seluruh proses kemandirian tersebut terjadi di dalam habitus sosial budaya tempat proses pendidikan berlangsung. Proses pendidikan sebagai proses menuju kemandirian seorang pribadi berarti merupakan suatu proses pembebasan dari ketidak berdayaan manusia yang memerlukan dialog dan hubungan inpersonal yang berdasarkan

keputusan-keputusan etis di dalam habitus lokal menuju kepada habitus nasional dan global.

1) **Romo Mangun Wijaya**

Romo Mangun adalah seorang humanis, menurut pandangan Romo Mangun manusia adalah makhluk kreatif yang dianugrahi oleh Sang Pencipta dengan kebebasan berfikir untuk menentukan tempatnya sendiri di dunia ini. Penjabaran prinsip-prinsip pendidikan Romo Mangun dari pandangan manusiannya banyak dipengaruhi oleh pandangan dari Rousseau dan Piaget. Rousseau mengingatkan pada kita bahwa anak mempunyai hakikat sendiri dan bukanlah orang dewasa dalam bentuknya yang kecil. Suasana alamiah adalah suasana dimana anak dapat berkembang secara sewajarnya yang bersifat kemanusiaan serta kekeluargaan. Dalam hal ini Romo Mangun banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran John Piaget yang telah meneliti tentang perkembangan kognisi anak. Namun demikian Romo Mangun mengingatkan bahwa hasil penemuan dan eksperimen dalam pendidikan di Eropa tentunya terkait dengan kebudayaan Eropa Barat yang dewasa ini telah cenderung ke arah materialisme dan ateisme. Prinsip-prinsip yang baik yang ada dalam idiologi Eropa tentunya ada yang bisa dimanfaatkan dalam proses pendidikan anak-anak Indonesia. Namun demikian prinsip-prinsip universal tersebut harus dicocokkan dengan variabel-variabel sosiologis, antropologis, dan politis di Indonesia.

a) **Prinsip mendasar proses pendidikan menurut Romo Mangun:**

- (1) Peserta didik mempunyai keinginan untuk mengeksplorasi dirinya dan alam sekitarnya. Peserta didik ingin mengembangkan dirinya sendiri. Dalam hal ini Romo Mangun tidak sepakat dengan teori tabula rasa dari John Locke dimana tugas pendidik seperti menuangkan air dalam cawan yang kosong. Pendidikan terjadi dalam situasi dialog karena peserta didik ingin menjadi dirinya sendiri dengan bantuan pendidik
- (2) Peserta didik dilahirkan dengan berbagai kemampuan seperti ingin untuk berdiri sendiri, ingin berkomunikasi dan mengembangkan bakat kebersamaannya dengan sesama temannya. Oleh sebab itu, kelas yang terlalu besar tidak memungkinkan pada peserta didik untuk mengembangkan kepribadiannya secara penuh. Kemampuan-kemampuan yang dibawa sejak lahir oleh peserta didik dapat dikembangkan dalam ramuan kekayaan sosial dan budaya peserta didik tempat dia ibesarkan. Oleh sebab itu keterkaitan antara pendidikan dan kebudayaan lokal mempunyai arti yang sangat penting dalam perkembangan kepribadian peserta didik.
- (3) Kondisi tempat proses pendidikan berlangsung, haruslah dalam suasana kekeluargaan. Sekolah umpamanya adalah bukan suatu arena persaingan hidup tapi suatu *confivium* (kehidupan bersama). Persaingan bukan berarti mengalahkan lawan atau memusuhi orang

lain, tapi justru dilahirkan oleh kesetiakawanan dalam upaya untuk memecahkan masalah bersama bagi kesejahteraan masyarakat.

- (4) Penataan diri sendiri (*self government*). Salah satu fitrah manusia adalah keinginan untuk berdiri sendiri atau menata diri sendiri. Oleh karena itu manusia dilahirkan dengan berbagai bakat dan kemampuan, maka di dalam penataan diri sendiri tersebut tergantung kepada bakat dan kemampuannya itu. Hal itu berarti proses pendidikan adalah proses yang menyeluruh yang memberikan kesempatan bagi peserta-didik untuk mengembangkan dirinya sendiri sesuai dengan bakatnya. Peserta didik dilahirkan dengan bakat-bakat bahasa, moral, estetika, religius, sosial, politik, dan sebagainya yang bagi orang perorang tidak sama. Ada yang menonjol bakat seninya, ada yang menonjol kemampuan ekspresinya serta berdialog dalam bahasa, ada pula yang menonjol kemampuan matematikanya, ada yang menonjol di dalam kemampuan olah raganya. Pendidikan bukan hanya ditujukan kepada satu jenis kemungkinan bakat peserta didik tapi untuk keberagaman bakat peserta didiknya. Dengan demikian akan lahir kebhinekaan perkembangan bakat-bakat peserta didik yang secara keseluruhan akan membentuk suatu masyarakat yang lebih berkualitas. Kualitas masyarakat yang demikian tidak hanya dapat dicapai melalui persaingan tetapi lebih pada kebersamaan.

b) Kreativitas dan Kebebasan

Bakat eksplorasi pada peserta didik akan membuahkan kreasi-kreasi baru dalam suasana kebebasan. Tanpa kebebasan tidak mungkin berkembang kemampuan kreatif dan keinginan untuk eksplorasi. Dengan demikian proses pendidikan yang sifatnya otoriter yang membatasi kebebasan-kebebasan peserta didik tidak mungkin berkembang dengan kreativitas peserta didik (Tilaar, 2008:61-65).

Proses belajar dalam kondisi kebebasan dan pengembangan kreativitas hanya akan terjadi di dalam pengalaman yang langsung dari peserta didik. Dalam hal ini terdapat penelitian Jean Piaget mengenai perkembangan kognisi peserta didik yang dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Pengembangan kognisi suatu anak diperoleh dari suatu pengalaman ke pengalaman lainnya melalui proses dialektis situasional. Artinya dengan sikap keingintahuan peserta didik dia akan bertanya mengenai hal yang ditemukannya di dalam lingkungannya. Lingkungannya menantang dia dan berdialog dengan peserta didik untuk mencari jawabannya.
- (2) Peserta didik mengalami keguncangan di dalam apa yang telah diketahuinya selama ini. Kondisi ini merupakan kondisi kritis yang berarti peserta didik merasa tidak puas terhadap pengalamannya selama ini.

(3) Sesudah mengalami proses kriis, peserta didik memasuki tahap perrenungan, pertimbangan, verifikasi dan klasifikasi terhadap jawaban yang telah disusunnya (Tilaar, 2008:66-67).

Inilah proses belajar kreatif yang sangat berlawanan dengan proses belajar menghafal apalagi dalam proses belajar dewasa ini yang hanya tertuju pada persiapan menghadapi ujian nasional dan bukan memberikan tantangan terhadap peserta didik terhadap kemampuan berfikirnya.

**c) Prinsip Proses pendidikan di Sekolah Dasar eksperimen
Mangunan**

Manusia yang dibatasi pengetahuan atau yang tidak memperoleh pendidikan berarti dibatasi akan kesadaran dirinya sehingga dia dikuasai oleh orang lain. Disinilah letak kesamaan pendapat Romo Mangun dengan Paulo Freire yang mengajarkan kodrat manusia dalam menghayati kesadarannya sebagai manusia yang berartabat. Penyadaran terhadap harkat manusia tersebut disebut oleh Paulo Freire sebagai *conscientization*. Pendidikan adalah keterlibatan seseorang dalam politik (praktis). Inilah salah satu tugas mulia yakni menyadarkan seseorang akan harga dirinya sebagai manusia yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab. Manusia yang miskin yang dibatasi kesempatannya untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas berarti membatasi kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat yang kreatif dan produktif. dia hanya

menjadi alat penguasa dan tetap bodoh sepanjang masa. Inilah nasib orang-orang kecil dan miskin serta tersingkirkan yang dibela oleh Romo Mangun dalam membela orang-orang di Kali Code Yogyakarta, untuk itu Romo Mangun membuat Sekolah Dasar (SD) Eksperimen Mangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

(1) Prinsip cinta kasih.

Proses pendidikan adalah proses dialog yang didasarkan kepada kasih antara sesama dan bukan indoktrinasi, pemaksaan, serta penindasan terhadap harkat manusia yang ingin kebebasan dan bertanggung jawab sendiri.

(2) Proses pendidikan berdasarkan pada kesamaan derajat antara pendidik dan peserta didik.

Dalam dialog tidak ada tempat pada arogansi atau sikap menggurui yang berarti kedudukan yang sama antara pendidik dan peserta didik.

(3) Proses pendidikan bukanlah suatu proses yang romantik, tetapi dalam suasana kebebasan dan jiwa terbuka antara pendidik dan peserta didik.

Dalam situasi inilah terjadi situasi di mana peserta didik dengan bebas mengadakan eksplorasi serta tugas pendidik adalah membantunya di dalam tugas bereksplorasi itu.

(4) Proses pendidikan sebagai proses menggiatkan eksplorasi berarti pula membangkitkan keberanian seseorang untuk mempertanyakan berbagai kemapanan sosial (*civil courage*).

Prinsip ini diambil Romo Mangun dari Paulo Freire yaitu menimbulkan kesediaan terhadap keterkucilan kaum kecil dari penindasan kekuasaan dari berbagai struktur kekuasaan dalam masyarakat.

- (5) Penyadaran terhadap harkat manusia telah ditindas oleh sistem pendidikan formal negara (Wijaya, 2004:233-235).

Sesuai dengan tujuan sekolah eksperimen sebagai pembebasan manusia, maka baik sekolah maupun kelasnya merupakan ruangan yang terbuka. Dalam ruangan yang terbuka secara fisik maupun psikis anak dapat berkembang sewajarnya dalam pengenalan terhadap kemampuan dirinya dan tantangan yang berada di lingkungannya baik berupa tantangan manusia maupun tantangan alam. Dalam proses pendidikan yang demikianlah seorang peserta didik dalam kemerdekaannya berdialog dengan dirinya sendiri, sesama peserta didik, dengan alam dan pendidikannya. SD Eksperimen Mangunan tidaklah sama dengan SD formal pada umumnya dalam sistem pendidikan nasional. Sekolah tersebut tidak mengenal kurikulum formal ataupun segala hal-hal lainnya yang bersifat formal birokratis yang segala aktivitasnya dalam proses belajar dalam suasana kebebasan. Namun demikian, di sekolah SD Mangunan bukan berarti tidak ada aturan main, ketertiban dan kepatuhan tetap penting dalam SD Mangunan, tetapi perintah dan kepatuhan tersebut bukanlah datang dari atas tetapi dari kesadaran sendiri dalam pergaulannya dengan sesama teman, dengan peserta didik serta dengan lingkungan sekitarnya. Mereka itu dibimbing untuk timbul kesadaran akan perlunya

tata tertib dan kepatuhan dalam mempelajari sesuatu sesuai dengan tingkat perkembangan kepribadiannya. Dalam kaitan ini penghayatan langsung terhadap gejala-gejala alam dalam ilmu kealaman serta pelajaran bahasa diperoleh langsung oleh peserta-peserta didik dalam penghayatannya dan dialognya dengan sesama kawannya (Pradipta, 2007:107-132).

Eksperimen yang dilakukan oleh Romo Mangun tentu sangat berbeda dengan sekolah-sekolah formal yang memenjarakan peserta didik. Sekolah-sekolah formal itu tidak mengembangkan kemandirian peserta didik, tetapi memaksa peserta didik menghafal agar lulus dalam ujian negara dan mendapatkan diploma formal atas keberhasilan pendidikannya. Masyarakat yang berdiri sendiri, yang bermoral, hendaknya dibebaskan dari sistem sekolah yang ada. Romo Mangun bukannya berpendapat untuk menghilangkan lembaga sekolah. Yang diinginkan mereka adalah mengubah tujuan dan proses pendidikan di sekolah yang bertujuan untuk pemerdekaan peserta didik dari berbagai proses indoktrinasi serta pemejaraan berfikir kreatif dan inovatif peserta didik.

2) Paulo Freire

Konsep pendidikan Paulo Freire lahir dari lingkungan masyarakat Barzil pada waktu itu. Paulo Freire melihat kenyataan bahwa kaum buruh yang hidup iskin dan berpendidikan rendah tidak mempunyai kesadaran terhadap nasibnya. Melalui pemberantasan buta huruf, pendidikan dasar, para buruh mulai menyaari akan

ketdakberdayaannya dan berupaya untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Tentunya cita-cita Paulo Freire pada saat itu tidak sesuai dengan penguasa. Akibatnya dia harus terdampar sebagai dosen tamu di Universitas Harvard tahun 1970'an dan kemudian bekerja sebagai konsultan di dewan gereja-gereja sedunia di Geneva. Dari lembaga inilah ide-ide Paulo Freire tersebar baik di Afrika maupun di beberapa negara di Asia.

Konsep-konsep pemikiran Paulo Freire mengenai pendidikan mempunyai kesamaan dengan pemikiran-pemikiran psikolog Carl Rogers, Ivan Illich, John Dewey, Lev Vygotsky. Dalam pemikiran Carl Rogers dia memberikan perhatian yang besar kepada kemerdekaan individu dalam berekspresi. Pendidikan adalah tanggung jawab peserta didik dan bukan pada guru. Adalah peserta didik yang bertanggung jawab terhadap perkembangan kepribadiannya melalui evaluasi dirinya. Oleh sebab itu, pendidikan haruslah "*student centered*" dan bukan berpusat pada guru. Peserta didik adalah master dari apa yang dipelajarinya. Dengan demikian bukanlah ujian atau tes sekolah atau oleh negara yang menentukan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik ataupun mengikuti apa yang telah diajarkan oleh pendidik terhadapnya. Proses pendidikan adalah memberikan kemampuan kepada peserta didik secara keseluruhan pribadinya dengan perasaan dan emosinya dalam menguasai ilmu pengetahuan. Inilah pendekatan proses pendidikan dari Rogers maupun Freire. Bagi Rogers, hubungan antara pasien dan terapis dalam hal ini semakin erat,

berbeda dengan pendekatan psikologi tradisional yang mengambil jarak. Seperti Paulo Freire, Carl Rogers dalam bukunya *On Personal Power* (1977) pendekatan psikologisnya bukan hanya diterima oleh kelompok menengah saja namun juga oleh kelompok yang tertindas. Memang bukunya terbit tahun 1969 (*Freedom to Learn*) dan Freire menulis *Pedagogy of Oppressed* tahun 1968.

Sebagai pendidik yang revolusioner Paulo Freire mempunyai berbagai prinsip yang konsisten. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Adanya koherensi antara teori dan praktik. Koherensi antara teori dan praktik ternyata bukan hanya dalam tulisan-tulisan Paulo Freire tetapi juga dalam sejarah kehidupannya.
- (2) Selalu menganalisis praktiknya sendiri sebagai seorang praktisi, sebagai seorang penggerak sosial dalam melawan berbagai penindasan di dalam masyarakat.
- (3) Sangat menghargai otonomi, tetapi bukan sesorang yang mudah terbawa arus. Dia tidak pernah melarikan diri dari suatu diskusi dan selalu memberikan opininya sendiri (Tilaar, 2007:293-107).

Dari beberapa teori diatas dalam penelitian ini penulis lebih menitik beratkan pada teori yang sesuai dengan fenomena penelitian yang ada, teori yang dirasa tepat untuk penelitian ini adalah teori yang dibangun oleh Romo Mangun karena mempunyai kesamaan perspektif dalam memandang hakikat manusia sebagai peserta didik baik yang terjadi di Sekolah Dasar Eksperimen

Mangunan maupun di Sekolah Alternatif Qoriyah Thoyyibah sebagai lokus penelitian ini, meskipun teori-teori yang dikemukakan oleh dua tokoh lain juga memiliki persamaan perspektif terhadap hakikat pendidikan diantaranya bahwa pendidikan adalah pembebasan dan berpusat pada peserta didik untuk menentukan nasibnya sendiri. Pada dasarnya ketiga teori diatas dapat digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini.

E. Kebijakan Pendidikan Berdasarkan Hakikat Pendidikan

Dalam antropologi filsafat dikenal bermacam-macam pandangan tentang hakikat manusia, seterusnya hakikat pendidikan tergantung kepada pandangan tentang hakikat manusia itu. Dalam teori sebelumnya telah dipaparkan pandangan manusia dari tiga tokoh pemikir yaitu Ki Hadjar Dewantara, Romo Mangun dan Paulo Freire. Ketiga tokoh tersebut mewakili berbagai jenis pandangan manusia. ketiga tokoh tersebut mempunyai kesamaan dalam melihat manusia bukan sebagai objek tetapi sebagai subjek yang bermartabat dan bertanggung jawab dalam memberikan makna terhadap kehidupannya. Namun demikian, kemerdekaan serta kreativitas manusia banyak terhalang dalam berbagai konstruksi dalam kehidupan sosial buatan manusia. dengan kata lain kesadaran akan pribadi yang merdeka dan berkreativitas telah dibatasi oleh berbagai jenis kekuasaan dalam masyarakat. Bagi tokoh-tokoh ini, gambaran manusia adalah makhluk personal yang bebas dan dapat mengembangkan pribadinya melalui dialog dengan sesamanya dan alam sekitarnya. Dalam dialog tersebut dibutuhkan kemerdekaan dan saling menghormati dalam kehidupan bersama. Aspek peronal dan aspek sosial dari

manusia merupakan gambaran manusia yang paling hakiki. Namun demikian, kenyataannya manusia dalam kehidupan sosial sering kali dirampas kemerdekaannya, sehingga tidak dapat berkembang. Proses pendidikan adalah proses pembebasan dari penindasan, dan pembebasan dari tekanan-tekanan kekuasaan yang menghambat perkembangannya dirinya. Pendidikan dilihat sebagai dekonstruksi terhadap berbagai struktur kekuasaan yang membatasi kemerdekaan manusia (Foucault, 2000:47).

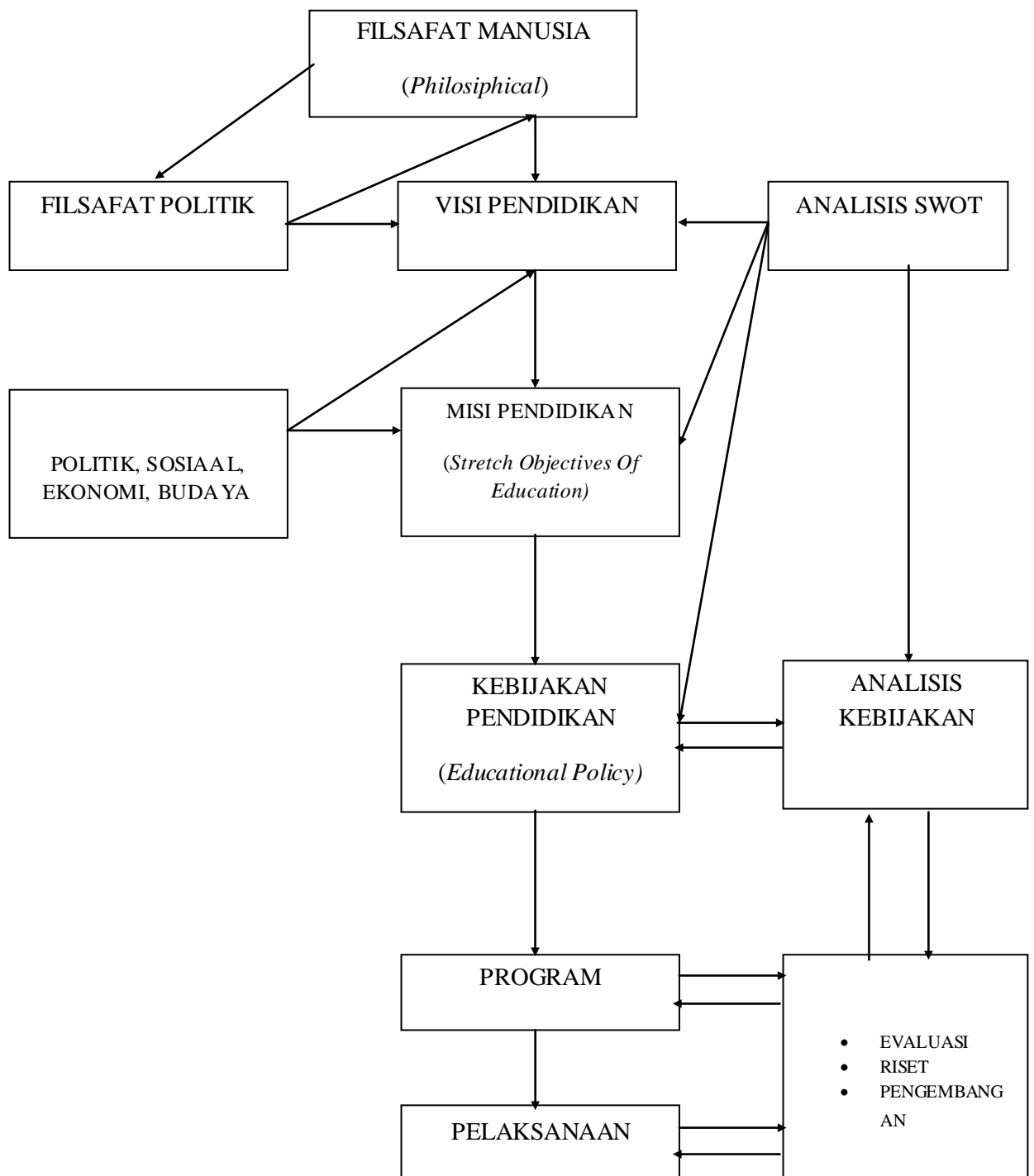
Proses pendidikan merupakan kesatuan antara teori dan praktik pendidikan. Praksis pendidikan yang merupakan kesatuan antara teori dan praktik meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Dalam lingkup teori dirumuskan gambaran manusia mengenai visi, misi dan program-program pelaksanaan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut.
- (2) Disamping aspek-aspek teoritis terdapat aspek pelaksanaan atau praktik dari tindakan pendidikan.
- (3) Proses terjadinya perumusan visi, misi dan program-program untuk mewujudkan visi dan misi pendidikan (Nugroho, 2008:173).

Setelah kita melihat penjabaran visi dan misi pendidikan dari pandangan manusia maka dapat kita simpulkan bahwa secara teoritis penjabaran visi dan misi pendidikan tidak bisa terlepas dari hakikat manusia sebagai makhluk personal sekaligus sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu perumusan visi misi tersebut tergantung pada aspek-aspek politik, sosial, dan ekonomi di mana manusia itu hidup. Selanjutnya, karena pendidikan itu

merupakan kesatuan antara teori dan praktik maka analisis kebijakan pendidikan merupakan salah satu input penting dalam perumusan visi misi pendidikan. Bahkan seterusnya program-program pendidikan yang telah diujicobakan atau dilaksanakan merupakan masukan bagi analisis kebijakan yang pada gilirannya akan lebih mempertajam atau memperhalus visi misi pendidikan.

Pada tataran praktik program-program yang telah dirumuskan memerlukan rambu-rambu dalam pelaksanaannya agar tujuan dari program-program tersebut dapat tercapai. Pelaksanaan program-program di lapangan memerlukan riset yang dilakukan secara terus menerus dan hasil riset serta pengembangan dari program-program ini merupakan input bagi analisis kebijakan yang pada gilirannya akan menyempurnakan rumusan-rumusan kebijakan pendidikan. Demikianlah kita lihat suatu siklus dalam penyusunan program, pelaksanaan program, riset dan pengembangan serta analisis kebijakan yang nantinya akan dapat memepertjam atau memperhalus visi, misi, kebijakan, serta program-program pendidikan. Untuk lebih jelasnya kebijakan pendidikan dalam filsafat dan teori pendidikan dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kebijakan Pendidikan dalam Filsafat dan Teori Pendidikan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan kebijakan pendidikan adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah startegis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.(Tilaar, 2008:140)

a. Kebijakan Pendidikan sebagai Implementasi Ilmu Pendidikan (sebagai ilmu praksis)

Pertama-tama kita melihat arti dan isi konsep Kebijakan dan Pendidikan. Kedua konsep tersebut mengandung makna yang dalam dan merupakan perdebatan akademik dari pakar sehingga menimbulkan berbagai jenis definisi dengan berbagai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Konsep mengenai kebijakan merupakan suatu kata bnda dari hasil deliberasi mengenai tindakan dari seseorang atau sekelompok pakar mengenai rambu-rambu tindakan dari seseoang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Riant Nugroho (2008:140) kebijakan mempunyai arti internasional, oleh sebab itu kebijakan mengatur tingah laku seseorang atau organisasi dan kebijakan meliputi pelaksanaan serta evaluasi dari tindakan tersebut. Hasil evaluasi tersebut akan menentukan bobot serta validitas dari kebijakan tersebut. Oleh karena pendidikan merupakan suatu ilmu praksis yang berarti kesatuan teori dan praktik maka kebijakan

pendidikan terletak dalam tatanan normatif dan tataran deskriptif. Adapun aspek-aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan adalah sebagai berikut:

1) Kebijakan pendidikan merupakan suatu keseluruhan deleberasi mengenai hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadi manusia dalam lingkungan kemanusiaan.

Proses pendidikan sebagai proses pemanusiaan terjadi dlam ingkungan alam serta lingknga sosialnya. Oleh sebab itu kebijakan pendidikan merupakan penjabaran dari visi dan misi dari pendidikan dalam masyarakat tertentu.

2) Kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu prksis yaitu kesauan antara teori dan praktik pendidikan.

Oleh karenanya kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi.

3) Kebijakan pendidikan haruslah empunai validita dalam erkembangan pribadi serta dalam masyarakat yang memiliki pendidikan itu.

Bagi perkembangan individu, validitas kebijakan pendidikan tampak dalam sumangannya bagi proses pemerdekaan individu dalam pengembangan pribadinya. Validitas sosial dari kebijakan pendidian tampak dalam perkembangan individu yang kreatif sehingga dapat mentransformasikan masyarakat serta kebudayaannya. Kebijakan endidikan yang menghalangi kemerdekaan pribadi berarti merampas hak-hak asasi manusia sehingga pada hakikatnya merupakan anti

pendidikan. Dengan demikian pula kebijakan pendidikan yang tidak menghargai aspek sosial manusia berarti mengisolasi manusia itu dari hidup bersama yang merupakan kondisi dalam proses pemanusiaan.

4) Keterbukaan.

Proses pendidikan sebagai proses pemanusiaan terjadi dalam interaksi sosial. Hal ini berarti bahwa pendidikan merupakan milik masyarakat. Apabila pendidikan itu merupakan milik masyarakat maka suara masyarakat dalam berbagai tingkat perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan perlu mendengar suara atau saran-saran dari masyarakat. Kebijakan pendidikan yang bisu dari suara-suara masyarakat merupakan penggerhanaan dari pendidikan itu sendiri. Hal itu terjadi dalam suatu masyarakat diktator atau otoritarian yang kebijakan pendidikannya ditentukan dari atas atau kelompok masyarakat tertentu saja berdasarkan kekuasaan yang dimilikinya. Kebijakan yang demikian adalah kebijakan yang didasarkan kepada pemaksaan dan hal itu berarti pembelengguan dari hakikat manusia yang paling hakiki yaitu kemerdekaan. Dilihat dari sifat keterbukaan kebijakan pendidikan bukan berarti kebijakan tersebut tidak mempunyai arah. Kebijakan pendidikan dalam prosesnya telah melalui pertimbangan-pertimbangan dari berbagai pihak sehingga keputusan keputusan yang diambil dapat bermanfaat bagi rakyat banyak. Kebijakan pendidikan yang elitis bertentangan dengan kehidupan sosial yang menghargai kemerdekaan manusia. Hanya dalam masyarakat

yang demokratislah kebijakan pendidikan akan bermanfaat bagi rakyat banyak.

5) Kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan. Suatu kebijakan pendidikan bukanlah suatu kebijakan yang abstrak tetapi kebijakan yang dapat diimplementasikan.

Suatu kebijakan pendidikan merupakan suatu pilihan dari berbagai alternatif kebijakan sehingga perlu dilihat output dari kebijakan tersebut dalam praktik. Melihat kenyataan bahwa proses pendidikan terjadi dalam masyarakat dengan berbagai aspek kehidupannya seperti aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, maka suatu kebijakan pendidikan adalah kajian dari berbagai pakar. Kebijakan pendidikan bukan monopoli dari pakar pendidikan saja namun juga berbagai pakar dari berbagai disiplin ilmu. Rumusan kebijakan pendidikan adalah hasil riset dan pertimbangan dari pakar multidisipliner dengan fokus pada kebutuhan peserta didik dalam proses memanusia. Melalui riset dan pengembangan, melalui eksperimen, maka berbagai kebijakan pendidikan dapat diuji validitasnya sehingga kebijakan pendidikan tersebut dapat direvisi dan dimantapkan. Dengan demikian, suatu kebijakan pendidikan akan terus berkembang memperbaiki diri dalam suatu siklus yang terus menerus.

6) Analisis kebijakan.

Sebagaimana pula dengan berbagai jenis kebijakan seperti kebijakan ekonomi, kebijakan pertanian, kebijakan pertahanan nasional dan semua jenis kebijakan dalam kebijakan publik memerlukan analisis

kebijakan. Dewasa ini analisis kebijakan telah berkembang dengan pesat demikian pula dengan analisis kebijakan pendidikan. Dalam masyarakat sekarang pendidikan bukan hanya milik pribadi atau milik keluarga dan masyarakat lokal saja, tetapi telah merupakan milik seluruh masyarakat dan seluruh warga negara. Oleh sebab itu sewajarnya apabila kebijakan pendidikan dalam masyarakat modern merupakan bagian dari kebijakan publik.

7) Kebijakan pendidikan pertama-tama ditujukan pada kebutuhan peserta didik.

Dalam dunia modern, pendidikan merupakan rebutan parta-partai politik. Hal ini disebabkan karena melalui pendidikan dapat dibentuk kader-kader politik yang akan menyebar luaskan dan mempertahankan ideologi partai politik tersebut. Oleh sebab itu setiap partai politik berusaha untuk mengerahkan kekuatan dan kekuasaan melalui ideologinya untuk berkuasa, maka kepentingan dan kebutuhan peserta didik bisa saja dilalaikan. Kebijakan pendidikan seharusnya diarahkan pada terbentuknya para intelektual organik yang akan menjadi agen-agen perubahan dalam masyarakatnya.

8) Kebijakan pendidikan diarahkan pada terbentuknya masyarakat yang demokratis.

Arkeologi proses pendidikan menunjukkan bahwa proses pendidikan terjadi dalam situasi dialogis. Dari situasi dialogis tersebut pribadi peserta didik semakin berdiri sendiri sehingga tugas pendidik cukup menuntun dari belakang (Tut Wuri Handayani) dan pada akhirnya

pribadi peserta didik dapat berkembang secara mandiri dan menjadi pribadi yang kreatif yang sebagai pendukung dan pelaku perubahan dalam masyarakat. Jadi kebijakan pendidikan harus memfasilitasi dialog dan interaksi dari peserta didik dan pendidik, peserta didik dan masyarakat, serta pada akhirnya peserta didik dengan kemanusiaan global.

9) Kebijakan pendidikan berkaitan dengan penjabaran misi pendidikan dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

Apabila visi pendidikan mencakup rumusan-rumusan umum yang abstrak, maka misi pendidikan lebih terarah pada pencapaian tujuan-tujuan yang konkret (*stretch goals*). Dalam hal ini kebijakan pendidikan terilakt dengan *time-frame* yang disepakati bersama. Indonesia misalnya, mempunyai visi pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Visi tersebut dijabarkan menjadi misi pendidikan nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2009-2014) serta Rencana Strategis dari masing-masing departemen yang berisi tujuan tahunan yang harus dicapai. Penentuan *stretch goals* dalam kebijakan pendidikan bukan berarti mengungkung proses pendidikan ke arah yang telah ditentukan. Oleh karenanya setiap kebijakan pendidikan harus ditopang dengan riset dan pengembangan agar dalam kesamaan arah yang ditentukan oleh *stretch goals* tersebut memberi peluang yang sebesar-besarnya kepada peserta didik untuk berkreasi dan bagi lembaga pendidikan untuk berinovasi.

Hal ini berarti lembaga pendidikan (sekolah, universitas) adalah lembaga-lembaga yang otonom, dalam arti memiliki tujuan yang sama namun pencapaian tujuan tersebut tergantung kepada kondisi dan kemampuan lembaga penyelenggaranya. Dengan demikian kebijakan pendidikan merupakan hal yang dinamis yang terus menerus berubah namun terarah dengan jelas.

10) Kebijakan pendidikan harus berdasarkan efisiensi. Kebijakan pendidikan bukan semata-mata berupa rumusan verbal mengenai tingkah laku dalam pelaksanaan praksis pendidikan.

Sebagai lembaga sosial, lembaga pendidikan membutuhkan sumber daya terutama sumber daya manusia (pendidik, organ-organ pendidik) dan sumber daya keuangan. Mengenai sumberdaya manusia diperlukan para pendidik profesional. Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2004 merupakan kebijakan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kebijakan pendidikan yang tidak didukung oleh tersedianya sumber daya manusia yang profesional merupakan pembrosan. Demikian pula kebijakan pendidikan yang tidak memperhitungkan tersedianya dana yang memadai adalah merupakan mimpi belaka. Kebijakan pendidikan yang baik adalah kebijakan pendidikan yang memperhitungkan kemampuannya di lapangan. Pertimbangan-pertimbangan kemampuan tenaga, tersedianya dana, pelaksanaan yang bertahap serta didukung oleh kemampuan riset dan pengembangan merupakan syarat-syarat mutlak bagi kebijakan pendidikan yang efisien.

11) Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan pada kekuasaan tetapi kepada kebutuhan peserta didik.

Kekuasaan itu diarahkan bukan untuk menguasai peserta didik tetapi kekuasaan untuk memfasilitasi dalam pengembangan kemerdekaan peserta didik. Dalam kaitan ini terdapat kesamaan tujuan antara kebijakan pendidikan dengan kebijakan publik.

12) Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan intuisi atau kebijakan yang irasional.

Kebijakan pendidikan merupakan hasil olahan rasional dari berbagai alternatif dengan mengambil keputusan yang dianggap paling efisien dan efektif dengan memperhitungkan berbagai jenis resiko serta jalan keluar bagi pemecahannya.

13) Kejelasan tujuan akan melahirkan kebijakan pendidikan yang

tepat. Kebijakan pendidikan yang kurang jelas arahnya akan mengorbankan kepentingan peserta didik. Hal ini misalnya dapat kita lihat dalam polemik mengenai Ujian Akhir Nasional khususnya pada ujian akhir sekolah dasar yang dilihat sebagai proyek dan bukan sebagai bagian dari proses pematangan peserta didik. Ketidakjelasan arah dari ujian akhir sekolah dasar tersebut misalnya dapat kita lihat dalam perubahan nama kegiatan dari Ujian Akhir Sekolah (UAS) menjadi Ujian Nasional Terintegrasi Ujian Sekolah (UNTUS), kemudian menjadi Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) dengan menghabiskan dana tidak kurang dari 96 milyar rupiah, polemik terjadi mengenai penyusunan soal-soal ujian oleh Pusat dan oleh

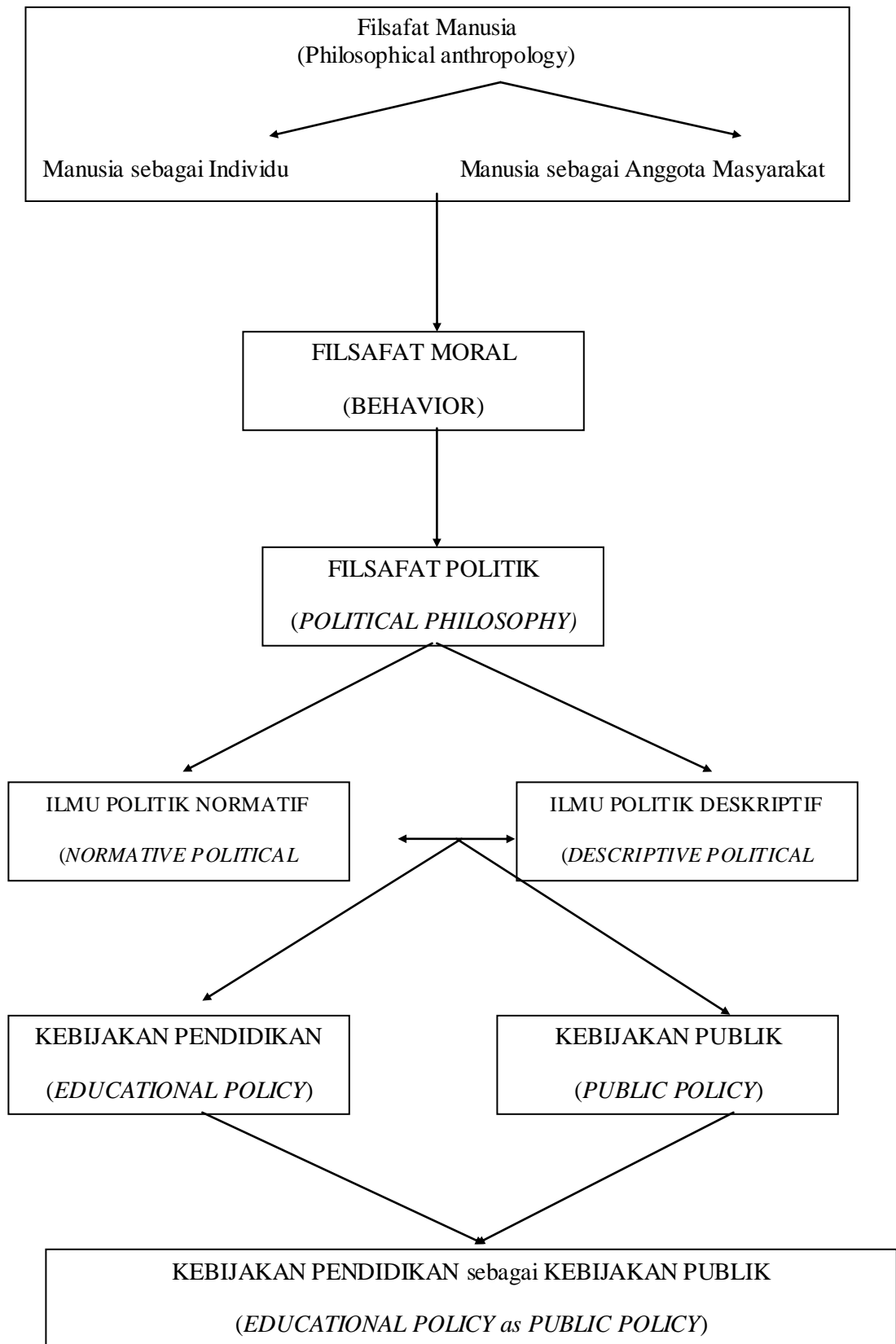
Pemerintah Daerah serta kelulusan peserta ujiannya. Untuk Sekolah Dasar (SD) diputuskan kelulusan ditentukan oleh Provinsi, sedangkan kelulusan Ujian Akhir Sekolah Menengah dan Sekolah Menengah Atas diselenggarakan dan ditentukan oleh Pemerintah (Pusat). Kebijakan pendidikan mengenai Standarisasi Pendidikan Nasional serta adanya Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) merupakan kebijakan pendidikan yang baik tujuannya, namun demikian pelaksanaan dari berbagai kebijakan nasional yang dirumuskan oleh BSNP selama ini menunjukkan kelemahan-kelemahan yang sangat fatal. Terlihat dengan jelas bahwa badan tersebut merupakan suatu lembaga kekuasaan yang meremehkan hakikat proses pendidikan sebagai proses pemerdekaan. Standar memang perlu untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan bertujuan sebagai pemetaan kondisi dan kualitas pendidikan di seluruh nusantara dengan perbedaan-perbedaan antar daerah yang cukup mencolok. Evaluasi pendidikan yang berupa ujian nasional bukan lagi berfungsi sebagai pemetaan pendidikan di seluruh nusantara tetapi berubah menjadi penentuan nasib peserta didik mengabaikan tujuan proses pendidikan sebagai pemerdekaan serta mengesampingkan fungsi dan tanggung jawab guru profesional dalam tugasnya membantu peserta didik dalam proses pemerdekaannya. Ujian atau evaluasi pendidikan nasional seharusnya dapat memberikan input bagi verifikasi serta penyesuaian kebijakan-kebijakan pendidika untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

14) Kebijakan pendidikan diarahkan bagi pemenuhan kebutuhan peserta didik dan bukan kepuasan birokrat.

Indonesia mengenal pameo “Ganti Menteri Ganti Kebijakan”, seperti yang telah dijelaskan titik tolak dari segala kebijakan pendidikan adalah untuk kepentingan peserta didik atau kemerdekaan peserta didik. Namun, apa yang terjadi dalam perkembangan pendidikan nasional tampak adanya perubahan kebijakan pendidikan secara mendadak dan bukan hasil kajian analisis kebijakan yang berkesinambungan. Kita ambil misalnya perubahan-perubahan kurikulum yang silih berganti yang tanpa evaluasi diubah karena adanya pergantian Menteri Pendidikan. Di Indonesia pernah ada sekolah sebagai pusat kebudayaan, sekolah sebagai perwujudan eksistensi peserta didik, kurikulum berdasarkan “*link and match*”, kurikulum berdasarkan kompetensi (KBK), dan yang terakhir adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Perubahan kebijakan pendidikan termasuk perubahan kurikulum adalah sesuatu yang wajar dan perlu. Namun perubahan tersebut terjadi pada saat terjadi pergantian menteri sehingga timbul kesan perubahan tersebut timbul hanya karena selera pribadi. Akibatnya terjadi *pengamburadulan* pendidikan nasional oleh karean tenaga pendidik yang tidak siap atas perubahan instruksi yang harus dijalankan oleh pendidik. Peserta didik menjadi korban dari keberagaman kebijakan yang tidak konsisten dan tanpa arah yang jelas. Pendidikan telah menjadi korban pencatruan kekuasaan dari politik praktis. Seyogyanyalah pendidikan haus

dikelola oleh para profesional yang mengerti akan hakikat pendidikan dan bukan oleh para politikus-politikus avonturir yang mengelola pendidikan hanya berdasarkan kekuasaan. (Tilaar, 2008:141-154)

Dengan demikian pemahaman tentang kebijakan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik

F. Desentralisasi Pendidikan dan Konsep Sekolah Alternatif

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang sebenarnya telah lama mengenal prinsip desentralisasi, namun penerapannya tidak pernah dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Baru pada tahun 1999 setelah adanya gerakan reformasi, Sejalan dengan perubahan paradigma pada pemerintahan umum yang lebih demokratis, yakni perubahan dari *government role* ke *community role*, keinginan untuk melaksanakan desentralisasi muncul kembali ke permukaan. Dengan berdasar pada Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah akhirnya desentralisasi mulai diberlakukan secara resmi pada tahun 2001 pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid. Perkembangan politik yang demikian cepat pada masa reformasi ini membuat kedua undang-undang di atas pun diganti dengan undang-undang yang baru yakni Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan ke pemerintah daerah otonom dilakukan dalam berbagai bidang atau urusan, kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama, yang masih menjadi urusan pemerintah pusat. Berdasarkan pasal 14 Undang-undang No. 33 Tahun 2004 terdapat 16 (enam belas) urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagai

urusan yang berskala kabupaten/kota. Salah satu urusan wajib tersebut adalah penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu bidang yang didesentralisasi, atau yang oleh pemerintah pusat dilimpahkan wewenang penanganannya kepada pemerintah daerah.

Desentralisasi pendidikan di Indonesia memang merupakan ikutan dari pelaksanaan desentralisasi pemerintahan umum. Namun demikian, kesempatan adanya desentralisasi pendidikan ini perlu dimanfaatkan sepenuhnya, sehingga desentralisasi pendidikan ini memberikan dampak yang positif bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Desentralisasi pendidikan di Indonesia merupakan peluang yang sangat baik untuk meningkatkan demokratisasi pendidikan, efisiensi manajemen pendidikan, relevansi pendidikan, dan mutu pendidikan. Dengan desentralisasi pendidikan daerah terpacu untuk memberikan pelayanan pendidikan yang baik kepada semua anak, termasuk anak-anak yang berada di daerah terpencil dan anak-anak kurang beruntung, minimal sesuai tuntutan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.

Desentralisasi pun mendorong terjadinya efisiensi manajemen pendidikan, karena sebagian besar wewenang pengelolaan pendidikan, baik perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan diserahkan kepada pemerintah daerah, yang disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, keinginan, dan kemampuan masing-masing daerah. Dengan wewenang yang besar dalam pengelolaan pendidikan, pemerintah

daerah pun terdorong untuk menggali berbagai potensi daerah dan mendorong partisipasi masyarakat untuk membantu membiayai pembangunan pendidikan di daerahnya. Sebaliknya, partisipasi masyarakat dapat dibangkitkan jika manajemen pendidikan di daerah atau sekolah dapat dilaksanakan secara efisien, transparan, dan akuntabel, serta tanggap terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Desentralisasi pendidikan di Indonesia merupakan peluang bagi peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dengan kata lain, ia merupakan peluang bagi peningkatan mutu pendidikan di setiap daerah. Hal ini karena perhatian terhadap peningkatan mutu guru, peningkatan mutu manajemen kepala sekolah, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan menjadi lebih baik jika dikelola oleh para pejabat pendidikan yang ada di daerah. Pada akhirnya, tujuan desentralisasi pendidikan adalah pada pemerataan mutu pendidikan yang meningkat ini.

Kebijakan desentralisasi pendidikan untuk mencapai harapan seperti di atas didukung oleh berbagai potensi baik berupa keputusan politik di tingkat pusat maupun daerah, gagasan-gagasan pendidikan yang inovatif, maupun kondisi nyata di daerah. Keputusan politik yang sangat mendukung adalah dicantumkannya ketentuan dalam UUD 1945 tentang anggaran minimal pendidikan sebesar 20%. Amanat konstitusional ini bukan hanya menjadi kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memenuhinya, tetapi juga mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan yang cukup tinggi pula bagi pembangunan pendidikan di daerahnya.

Potensi berikutnya adalah adanya kebijakan penciptaan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang bernuansa lebih demokratis dalam mendukung pendidikan di daerah dan sekolah, yakni dewan pendidikan dan komite sekolah. Dewan Pendidikan yang berada di tingkat kabupaten/kota (beberapa juga ada di tingkat provinsi) merupakan sebuah lembaga independen yang anggotanya mencerminkan tokoh-tokoh yang peduli pada pendidikan. Dewan pendidikan memiliki peran strategis, misalnya berperan sebagai pemberi pertimbangan dan dukungan terhadap pihak eksekutif dan legislatif dalam hal pendidikan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan oleh eksekutif, dan berperan pula sebagai penghubung antara legislatif, eksekutif dan masyarakat pada umumnya. Sementara itu, komite sekolah (kadang disebut dengan nama lain seperti dewan sekolah atau majlis madrasah) merupakan sebuah organisasi yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan orang tua siswa, guru, dan tokoh masyarakat yang peduli pendidikan, termasuk dari kalangan dunia usaha. Lembaga ini berperan sebagai mitra kerja pihak sekolah dalam memajukan pelayanan pendidikan di sekolah secara lebih demokratis, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Gagasan lainnya yang sejalan dengan desentralisasi pendidikan adalah manajemen pendidikan yang berbasis masyarakat (*community-based management*) dan manajemen berbasis sekolah (*school-based management*). Nielsen (Jalal dan Supriadi, 2001) memberikan definisi umum tentang pendidikan berbasis masyarakat sebagai “pendidikan yang sebagian besar keputusan-keputusannya dibuat oleh masyarakat.” Dari pengertian ini dapat difahami bahwa pendidikan berbasis masyarakat itu intinya adalah

keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pada penyelenggaraan pendidikan, bukan sekedar pada sumbangan modal atau dana bagi pendidikan saja. Ada berbagai alasan yang mendasari diterapkannya manajemen pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*) di Indonesia:

- **Pertama.**
Kebijakan otonomi daerah yang mendorong diterapkannya desentralisasi pendidikan, sehingga daerah dan masyarakat diberikan peluang yang lebih besar untuk mengambil keputusan dalam bidang pendidikan.
- **Kedua.**
Keinginan pemerintah untuk mendemokraskan kehidupan masyarakat sipil Indonesia (demokratisasi masyarakat madani), termasuk demokratisasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
- **Ketiga.**
Keterbatasan dana pendidikan pemerintah, terutama akibat krisis politik dan ekonomi yang berkepanjangan, sehingga pemerintah kurang mampu untuk membiayai pendidikan di seluruh Indonesia secara optimal.
- **Keempat.**
Keanekaragaman masyarakat Indonesia, sehingga pendidikannya kurang efektif jika dikelola secara sentralistik oleh pemerintah tanpa melibatkan partisipasi masyarakat.

- **Kelima.**

Pada kenyataannya sejak dulu masyarakat telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, sekalipun memiliki keterbatasan.

Undang-Undang terbaru yang mendukung pelaksanaan desentralisasi pendidikan adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Otonomi dalam pendidikan membawa perubahan paradigma pendidikan yang semula tersentralisasi menjadi terdesentralisasi. Arah perubahan paradigma pendidikan dari paradigma lama ke paradigma baru meliputi berbagai aspek sebagai berikut:

Tabel. 2.1 Perbandingan Paradigma Pendidikan

Paradigma Lama	Paradigma Baru
Sentralistik	Desentralistik
Kebijakan yang <i>top down</i>	Kebijakan yang <i>bottom up</i>
Orientasi pengembangan parsial: Pendidikan untuk pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan teknologi perakitan	Orientasi pengembangan holistik: Pendidikan untuk pengembangan kesadaran untuk bersatu dalam kemajemukan budaya, menjunjung tinggi nilai moral, kemanusiaan dan agama, kesadaran kreatif, produktif, kesadaran hukum
Peran pemerintah sangat dominan	Meningkatnya peran serta masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif
Lemahnya peran institusi non sekolah	Pemberdayaan institusi masyarakat: keluarga, LSM, pesantren, dan dunia usaha.

Sumber :Jalal, Fasli (2001:5)

Konsep Sekolah Alternatif

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) guru berhak memberikan penilaian keberhasilan peserta didik. Pasal 58 ayat 1 menyatakan, evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Selain itu, pasal 59 ayat 1 dinyatakan, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Jadi menurut Undang-Undang Sisdiknas evaluasi belajar hendaknya dilakukan oleh pendidik sementara pemerintah hanya mengevaluasi pengelolaan, satuan jalur, jenjang dan jenis pendidikan dan seharusnya tidak mengintervensi kelulusan peserta didik.

Konsep sekolah alternatif mengacu pada amanat Undang-Undang No 20 Tahun 2003 yang menyatakan guru berhak memberikan penilaian keberhasilan peserta didik. Pasal 58 ayat 1 menyatakan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Selain itu, pasal 59 ayat 1 dinyatakan, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Jadi menurut Undang-Undang Sisdiknas evaluasi belajar hendaknya dilakukan oleh pendidik, sementara pemerintah hanya mengevaluasi pengelolaan, satuan jalur, jenjang dan jenis pendidikan dan seharusnya tidak mengintervensi kelulusan peserta didik.

Ada banyak bentuk sekolah alternatif di Indonesia misalnya sekolah alternatif yang berkonsep *Home Schooling*, yaitu konsep sekolah alternatif yang dalam pelaksanaannya memanfaatkan sarana teknologi berbasis internet. *Home Schooling* di Indonesia muncul sekitar tahun 2000, konsep ini muncul dengan basis pemikiran adanya tuntutan global dalam pemanfaatan teknologi. *Home Schooling* juga menjawab kebutuhan-kebutuhan peserta didik akan pendidikan dimana mereka sebagai peserta didik mempunyai keterbatasan waktu dan tempat dalam melaksanakan proses pendidikan. Dengan konsep *Home Schooling*, peserta didik dapat melakukan pembelajaran di rumah melalui media internet dengan waktu yang fleksibel. Hal ini tidak bisa dilakukan di sekolah formal pada umumnya yang mana peserta didik wajib berangkat ke sekolah dengan waktu yang telah ditentukan untuk mengikuti proses pembelajaran. Tentu saja terdapat plus minus dari konsep sekolah alternatif ini, karena memanfaatkan media teknologi yang berbasis internet, maka sekolah ini relatif memerlukan biaya yang tidak murah, pada umumnya peserta didik di sekolah ini berasal dari kalangan menengah ke atas.

Selain itu ada pula sekolah berbasis komunitas misalnya sekolah gratis yang didirikan oleh Sony Sugema di Bandung yang bernama Alfa Centauri, ada juga sekolah-sekolah gratis yang didirikan oleh Dompok Duafa Republika yaitu Smart Cendekia, sekolah Master (Masjid Terminal) di Depok, komunitas Kaki Langit di Tangerang, sekolah Ibu Kembar bawah jembatan di Jakarta, dan sekolah-sekolah berbasis komunitas yang bentuknya adalah rumah singgah dan sanggar belajar. Sekolah berbasis komunitas ini juga merupakan

suatu solusi transfer pendidikan yang tidak bisa dipenuhi oleh pendidikan formal yang ada saat ini. Sekolah berbasis komunitas benar-benar memperhatikan latar belakang dari peserta didiknya dan menemukan metoda-metoda belajar mandiri yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Mengenai biaya yang dikeluarkan untuk proses pendidikan ini diperoleh dari komunitas dan donatur secara sukarela, namun secara kualitas sekolah ini patut diacungi jempol. Lulusan sekolah ini sebagian berijazah namun juga sebagian tidak mengandalkan ijazah formal untuk bertahan hidup, karena mereka telah dibekali *life skill* yang sesuai dengan potensi mereka.

Salah satu bentuk lain dari sekolah berbasis komunitas adalah sekolah alam, seperti sekolah alam yang diasuh oleh Butet Manurung yang keberadaannya jauh di tengah hutan Sumatra atau lebih dikenal dengan Sekolah Suku Anak Dalam. Ada pula sekolah alternatif Utan Kayu, Sekolah Alternatif Cendekia Mandiri di Temanggung, dan Sekolah Alternatif Qoryah Thoyyibah di Salatiga. Sekolah alam ini mempunyai konsep pembelajaran di mana para peserta didik diajak untuk lebih dekat dengan alam dan lingkungan sekitarnya, serta memaksimalkan potensi alam yang ada di lingkungan mereka sesuai dengan potensi dan keunikan yang mereka miliki. Sekolah alam ini pada dasarnya ingin membuka wacana bawasannya menuntut ilmu atau belajar tidak harus dilakukan di dalam gedung sekolah saja yang memerlukan berbagai macam fasilitas yang bagi sebagian besar anak bangsa tidak sanggup untuk memenuhinya. Sekolah alam ini juga mengasah kepekaan sosial para peserta didiknya terhadap kearifan lokal yang ada di sekitarnya. Unikny, di

sekolah alam ini para peserta didik benar-benar diberi kebebasan dalam proses pembelajaran, mereka berhak menentukan pelajaran apa yang mereka sukai, metode seperti apa yang cocok untuk mereka dan mereka bebas mengembangkan potensi diri sesuai dengan keunikan mereka masing-masing, di sini proses pendidikan berlangsung secara *student center learning*

Sekolah alternatif yang lain adalah sekolah kejar paket A yang setara dengan Sekolah Dasar (SD), sekolah kejar paket B setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sekolah kejar paket C setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sekolah kejar paket ini bernaung di bawah Departemen Pendidikan Nasional yang ditangani langsung oleh bidang Pendidikan Non Formal Indonesia. Mengenai materi atau kurikulum pembelajaran mengacu pada kurikulum nasional yang ada di Indonesia. Serta para lulusannya pun mendapat ijazah yang setara dengan sekolah formal. Hanya saja dalam proses pembelajarannya dari segi waktu belajar lebih fleksibel dibandingkan dengan sekolah formal, dan dari segi biaya jauh lebih murah dan terjangkau atau bahkan dibebaskan dari biaya sekolah.

Bentuk-bentuk sekolah alternatif diatas muncul karena adanya kebutuhan-kebutuhan peserta didik yang tidak dapat dipenuhi oleh sekolah formal yang ada. Selain itu sekolah alternatif menjadi pilihan solusi bagi sebagian peserta didik dalam mengenyam pendidikannya dengan metode dan pembelajaran yang berbeda. Bagi sebagian orang, sekolah alternatif adalah jawaban dari hakikat pendidikan yang sebenarnya, dimana peserta didik mempunyai keberagaman dan keunikan masing-masing sehingga tidak bisa

disamaratakan potensi mereka dengan menjustifikasi kecerdasan mereka melalui nilai Ujian Nasional. Sekolah alternatif muncul juga sebagai kritik akan ketidak sinkronan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pelaksanaannya.

G. KONSEP ANALISIS SOAR (Strength, Opportunities, Aspirations, Result)

Menurut para pencetus SOAR, dalam kaitannya dengan perubahan yang akan dilakukan oleh organisasi, analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Treath*) yang lazim digunakan untuk menganalisis suatu perencanaan maupun strategi dalam organisasi ini memiliki kekurangan. Dalam proses perencanaan dengan analisis SWOT, perusahaan harus menghabiskan sebagian waktunya guna memikirkan hal-hal positif (*strengths, opportunities*) dan sebagiannya lagi untuk mengurus hal-hal negatif (*weaknesses, threats*). Namun kenyataannya, manusia cenderung lebih suka menonjolkan hal-hal negatif (*weaknesses, threats*). Padahal, kita cenderung lebih suka melupakan kekurangan dan pengalaman buruk yang terjadi di masa lalu. Kita akan lebih termotivasi manakala menyadari bahwa kelebihan atau kekuatan yang kita miliki dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan organisasi. Untuk itulah Stavros, Cooperrider, dan Kelly menawarkan konsep SOAR (*Strengths, opportunities, aspirations, results*) sebagai alternatif terhadap analisis SWOT., yang berasal dari pendekatan *Appreciative Inquiry* (AI). Pendekatan AI lebih menitikberatkan pada pengidentifikasian dan pembangunan kekuatan dan peluang ketimbang pada masalah, kelemahan, dan

ancaman. Pendekatan SOAR terhadap rencana strategis memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan model tradisional. Analisis SOAR memungkinkan anggota organisasi menciptakan masa depan yang mereka inginkan sendiri dalam keseluruhan proses dengan cara melakukan penyelidikan, imajinasi, inovasi, dan inspirasi. Fokus internal SOAR adalah kekuatan organisasi. SOAR juga digunakan untuk analisis eksternal, misalnya analisis mengenai pemasok dan pelanggan. Keuntungan lainnya berkaitan dengan partisipasi. Pada banyak organisasi, perencanaan strategis hanya melibatkan orang-orang pada tingkatan tertinggi serta sekelompok stakeholder. Namun dalam kerangka kerja SOAR, sebanyak mungkin stakeholder dilibatkan, yang didasarkan pada integritas para anggotanya. Masalah integritas menjadi sangat penting karena para stakeholder harus menyadari asumsi-asumsi yang menjadi dasar penggerak bagi para pemimpin organisasi.

Dalam artikel yang ditulis oleh AB. Susanto dikatakan bahwa analisis SOAR bagi perencanaan strategis dimulai dengan penyelidikan (*inquiry*) yang menggunakan pertanyaan positif guna mempelajari nilai-nilai inti, visi, kekuatan, dan peluang potensial. Dalam fase ini, pandangan-pandangan dari setiap anggota organisasi dihargai. Penyelidikan juga dilakukan guna memahami secara utuh nilai-nilai yang dimiliki oleh para anggota organisasi serta hal-hal terbaik yang pernah terjadi di masa lalu. Kemudian anggota organisasi dibawa masuk ke dalam fase imajinasi, memanfaatkan waktu untuk “bermimpi” dan merancang masa depan yang diharapkan. Dalam fase ini,

nilai-nilai diperkuat, visi dan misi diciptakan. Sasaran jangka panjang dan alternatif strategis dan rekomendasi diumumkan. Fase ketiga adalah inovasi, yaitu dimulainya perancangan sasaran jangka pendek, rencana taktikal dan fungsional, program, sistem, dan struktur yang terintegrasi untuk mencapai tujuan masa depan yang diharapkan. Guna tercapainya hasil terbaik yang terukur, karyawan harus diberikan inspirasi melalui sistem pengakuan dan penghargaan. SOAR adalah sebuah pendekatan yang inovatif serta berbasiskan pada kekuatan (*strength-based approach*) terhadap perencanaan strategis. SOAR dapat membuat kita lebih memfokuskan diri kepada hal yang paling penting, yaitu masa depan karyawan dan organisasi.

Perencana strategis menuliskan pertanyaan yang bersifat menyelidiki guna menentukan arah (*direction*) dari proses perencanaan strategis serta menginformasikan isi dari perencanaan strategis tersebut berdasarkan kepada kekuatan dan peluang yang ada. Inilah yang disebut oleh Stavros, Cooperrider, dan Kelley dengan penyelidikan strategis (*strategic inquiry*) dengan tujuan yang bersifat apresiatif (*appreciative intent*). SOAR dapat dimanfaatkan pada saat perusahaan melakukan hal-hal seperti pemindaian (*scanning*) terhadap lingkungan internal ataupun eksternal, evaluasi dan penciptaan kembali visi, misi, dan nilai-nilai organisasi, formulasi strategi dan rencana strategis pada berbagai unit dan level organisasi, serta perencanaan dan implementasi perubahan.

Dalam analisis SOAR, anggota organisasi dapat belajar untuk mengidentifikasi inti positif (*positive core*) yang dimiliki oleh organisasi,

memperoleh kejelasan (clarity) terhadap nilai, visi, misi, untuk kemudian diselaraskan dengan strategi, inisiatif, dan rencana aksi yang disusun. Selain itu, merencanakan, mendesain, dan memfasilitasi keseluruhan perencanaan strategis, serta mengidentifikasi pengukuran yang mendorong kinerja. Metode SOAR, yang telah dijalankan oleh beberapa organisasi, baik bisnis maupun non-bisnis, terbukti mampu memperbaiki kinerja, seperti produktivitas dan penjualan, komunikasi yang terbuka dan berkesinambungan, serta meningkatnya moral karyawan yang merosot.

Model SOAR mengubah analisis SWOT, yang sudah sangat mapan, dalam hal faktor-faktor kekurangan (weakness) internal organisasi serta ancaman (threats) eksternal yang dihadapinya ke dalam faktor-faktor aspirasi (aspiration) yang dimiliki perusahaan serta hasil (results) terukur yang ingin dicapai. Model analisis ini beranggapan bahwa faktor kekurangan dan ancaman dapat memunculkan perasaan negatif bagi para anggota organisasi, sehingga menurunkan motivasi mereka untuk berbuat yang terbaik.

Dalam strength (S), hal-hal yang menjadi kekuatan serta aset terbesar yang dimiliki diungkapkan, baik aset yang berwujud maupun aset yang tidak berwujud. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk memberikan penghargaan terhadap segala hal-hal positif yang dimiliki, yang pasti akan selalu dimiliki baik oleh individu maupun organisasi. Kekuatan inilah yang akan terus dikembangkan demi kemajuan organisasi maupun individu di masa depan.

Opportunities (O) berarti dilakukannya analisis terhadap lingkungan eksternal guna mengidentifikasi peluang terbaik yang dimiliki serta dapat dimanfaatkan oleh organisasi. Lingkungan eksternal adalah sebuah wilayah yang penuh dengan berbagai macam kemungkinan dan peluang. Salah satu syarat bagi keberhasilan suatu perusahaan adalah kemampuannya memaksimalkan peluang yang dimiliki. Hal ini mensyaratkan adanya cara pandang yang positif dalam memandang lingkungan eksternal yang berubah dengan sangat cepat.

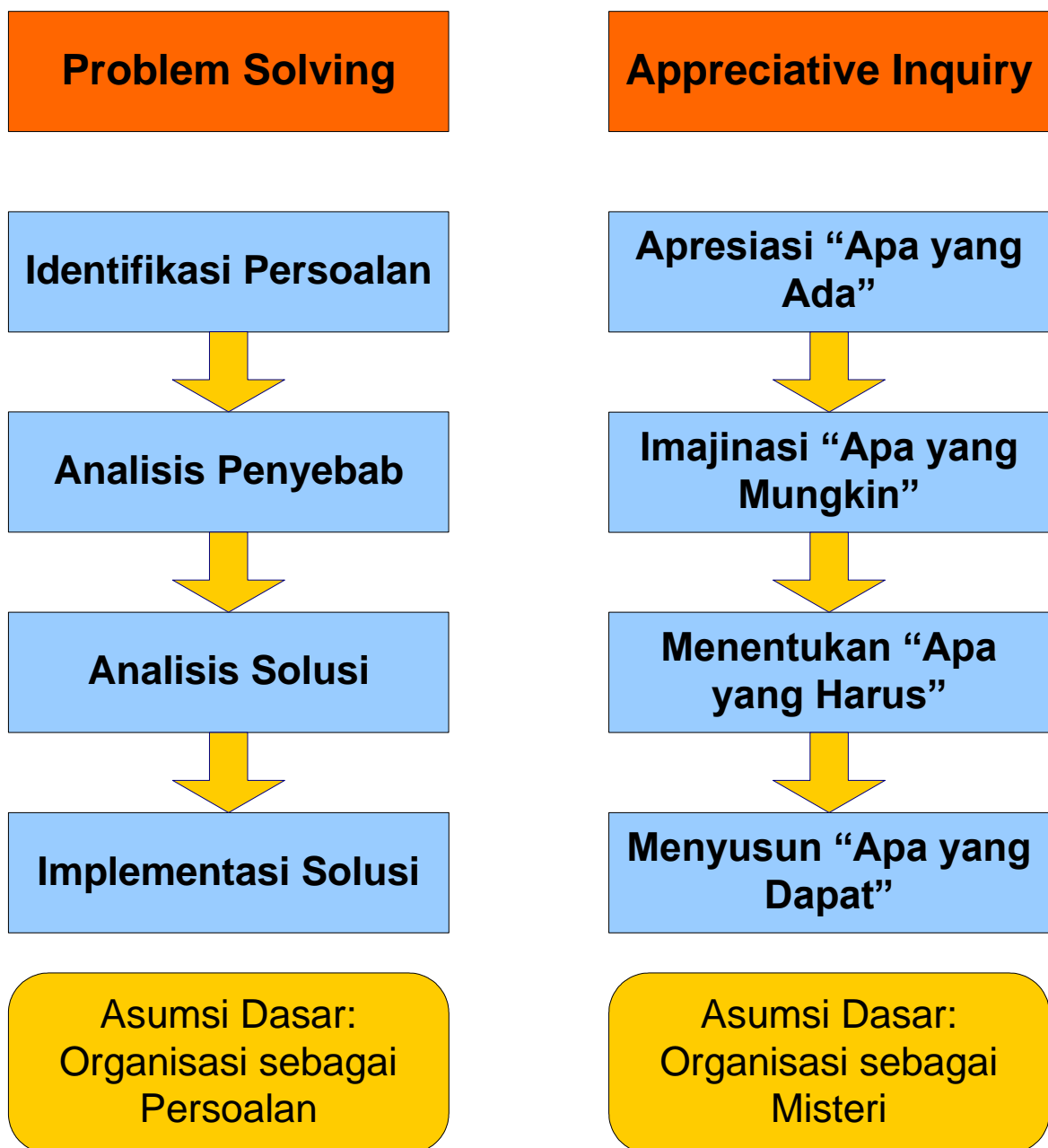
Dalam menganalisis aspirations (A), para anggota organisasi berbagi aspirasi dan merancang kondisi masa depan yang mereka impikan, yang dapat menimbulkan rasa percaya diri dan kebanggaan baik terhadap diri sendiri, pekerjaan, departemen, maupun organisasi secara keseluruhan. Saling berbagi aspirasi ini menjadi hal yang sangat penting guna menciptakan visi, misi serta nilai yang disepakati bersama, yang menjadi panduan bagi perjalanan organisasi menuju masa depan.

Results (R) berarti menentukan ukuran dari hasil-hasil yang ingin dicapai (*measurable results*) dalam perencanaan strategis, guna mengetahui sejauh mana pencapaian dari tujuan yang telah disepakati bersama. Agar para anggota organisasi merasa termotivasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan ini, maka perlu dirancang sistem pengakuan (*recognition*) dan reward yang menarik.

Pendekatan SOAR dimulai dengan penyelidikan (inquiry) dengan mengajukan pertanyaan positif tanpa syarat (unconditional positive questions) guna mempelajari nilai inti, visi, kekuatan, dan peluang potensial organisasi. Penyelidikan adalah saat untuk melakukan refleksi terhadap kekuatan di masa lalu serta bagaimana kekuatan ini dibangun. Kemudian, peserta memasuki fase imajinasi (imagination), dimana mereka menghabiskan waktu untuk bermimpi dan membangun masa depan yang diinginkan.

Tujuan jangka panjang dan alternatif strategis dan rekomendasi dipresentasikan. Fase berikutnya adalah saat untuk melakukan inovasi (innovation) untuk memulai desain strategis dari tujuan jangka pendek, rencana taktikal dan finansial, serta sistem, struktur, dan program yang terpadu guna mewujudkan masa depan yang diinginkan dengan hasil terbaik.

Dapat kita simpulkan inti metode ini bertumpu kepada mencari apa yang terbaik yang dimiliki oleh organisasi, segala kekuatan yang ada pada organisasi. Kemudian berdasarkan apresiasi terhadap kelebihan yang dimiliki, mencari peluang-peluang yang tersedia, aspirasi ditampung dan dirumuskan dalam measurable result. Tentu disertai dengan pengakuan dan reward yang pantas. (<http://web.bisnis.com/kolom/2id263.html>)



Gambar 2.3 SWOT vs SOAR

Sumber Presentasi Advokasi Kebijakan Pendidikan oleh Muntajid
(www.google.com)

Dampak Pendekatan Problem Solving:

- Merasa sakit karena dipaksa melihat kelemahan di masa lalu
- Lahirnya sikap defensif (saling tuding, lempar tanggung jawab, dan mencari kambing hitam)
- Tidak percaya diri untuk melakukan tindakan positif, karena apa pun tindakannya selalu dilihat kekurangan dan kelemahannya
- Jarang melahirkan visi baru, karena hanya terfokus pada kenyataan dan jarang merefleksikan tujuannya
- Hanya memindahkan persoalan atau melahirkan persoalan baru

Dampak Pendekatan Appreciative Inquiry:

- Berpijak pada hipotesis *heliotropic* yaitu organisasi tumbuh berkembang mengarah kepada image paling positif yang diyakini.

Jika digambarkan dalam suatu tabel maka analisis SOAR akan nampak sebagai berikut:

<p>STRENGHT/ KEKUATAN</p> <p>Hal-hal yang menjadi kekuatan serta aset terbesar yang dimiliki diungkapkan, baik aset yang berwujud maupun aset yang tidak berwujud. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk memberikan penghargaan terhadap segala hal-hal positif yang dimiliki, yang pasti akan selalu dimiliki baik oleh individu maupun organisasi. Kekuatan inilah yang akan terus dikembangkan demi kemajuan organisasi maupun individu di masa depan.</p>	<p>ASPIRATIONS/IDE-IDE</p> <p>Para anggota organisasi berbagi aspirasi dan merancang kondisi masa depan yang mereka impikan, yang dapat menimbulkan rasa percaya diri dan kebanggaan baik terhadap diri sendiri, pekerjaan, departemen, maupun organisasi secara keseluruhan. Saling berbagi aspirasi ini menjadi hal yang sangat penting guna menciptakan visi, misi serta nilai yang disepakati bersama, yang menjadi panduan bagi perjalanan organisasi menuju masa depan.</p>
<p>OPPORTUNITIES/ PELUANG-PELUANG</p> <p>analisis terhadap lingkungan eksternal guna mengidentifikasi peluang terbaik yang dimiliki serta dapat dimanfaatkan oleh organisasi. Lingkungan eksternal adalah sebuah wilayah yang penuh dengan berbagai macam kemungkinan dan peluang. Salah satu syarat bagi keberhasilan suatu perusahaan adalah kemampuannya memaksimalkan peluang yang dimiliki. Hal ini mensyaratkan adanya cara pandang yang positif dalam memandang lingkungan eksternal yang berubah dengan sangat cepat.</p>	<p>RESULT/INDIKATOR HASIL</p> <p>Ukuran dari hasil-hasil yang ingin dicapai (measurable results) dalam perencanaan strategis, guna mengetahui sejauh mana pencapaian dari tujuan yang telah disepakati bersama.</p>

Gambar 2.4. Analisis SOAR

Sumber: Presentasi Analisis SOAR untuk advokasi Kebijakan Pendidikan (Muntajid 2009 www.google.com)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Perspektif Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yakni penelitian yang dimaksudkan untuk membuat analisis terhadap pencandraan atau gambaran (deskriptif) mengenai dasar informasi, situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat (Ndraha, 1985:100). Dikatakan juga metode penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu saat tertentu (Ndraha, 1985:105). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status variabel atau tema, gejala, atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif tidak memerlukan administrasi atau pengontrolan terhadap suatu perlakuan (Arikunto, 1998:3009).

Menurut Hadari Nawawi (1993:91), penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat hanya sekedar untuk mengungkapkan fakta. Sifat

deskriptif merupakan salah satu karakteristik dari penelitian kualitatif (Moleong, 1990:6). Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Penggunaan pendekatan kualitatif, sesuai dengan pendapat Guba yang menjelaskan sifat-sifat desain penelitian kualitatif itu tidak memilih sampel dari suatu populasi sehingga dapat digunakan untuk mengadakan generalisasi. Penelitian ini tidak hendak menguji hipotesis, sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang tidak bertujuan untuk menguji hipotesis. Yang akan banyak diteliti adalah fenomena-fenomena yang terjadi di lokasi penelitian serta melakukan analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati. Tipe penelitian seperti ini menurut seorang peneliti untuk melakukan studi aktif di lapangan.

Penelitian ini mencoba untuk menganalisis serta mendeskripsikan konsep dan strategi sekolah alternatif sebagai wujud program Wajib Belajar Sembilan Tahun yang diterapkan di Sekolah Alternatif Qoriyah Thoyibah di Desa Kalibening Salatiga. Penelitian ini menggunakan analisis SOAR (*strengths, opportunities, aspirations, results*) untuk mengidentifikasi lingkungan internal maupun eksternal yang turut mempengaruhi pelaksanaan konsep dan strategi dari sekolah alternatif Qoriyah Thoyibah di Desa Kalibening Salatiga sebagai wujud program Wajib Belajar Sembilan Tahun sehingga dapat diketahui isu-isu strategis dalam pelaksanaan konsep dan strategi tersebut.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah analisis terhadap dukungan lingkungan internal dan eksternal dalam pelaksanaan konsep dan strategi sekolah alternatif Qoriyah Thoyibah di Desa Klibening Salatiga sebagai wujud program Wajib Belajar Sembilan Tahun.

C. Lokus Penelitian

Penentuan lokus penelitian ini dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup dalam pembahasan sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial yang ingin dikaji sesuai dengan permasalahan. Pemilihan lokus dalam penelitian kualitatif sangat penting dan dilakukan dengan sistem *purposive* yakni pemilihan lokasi yang didasarkan atas tujuan tertentu. Penelitian ini difokuskan pada Sekolah Alternatif Qoryah Thoyyibah di Desa Kalibening Salatiga di Desa Kalibening dimana sekolah ini merupakan sekolah alternatif pertama di Jawa Tengah yang mempunyai konsep dan strategi mandiri sebagai wujud program Wajib Belajar Sembilan Tahun.

D. Fenomena Penelitian

Menurut Idrus (2007:80), penelitian dengan berlandaskan fenomenologi melihat obyek penelitian dalam suatu konteks naturalnya, artinya seorang peneliti kualitatif melihat suatu peristiwa tidak parsial, lepas dari konteks sosialnya. Fenomenologi yang sama dalam situasi yang berbeda, akan memiliki makna yang berbeda pula. Fenomena yang akan diamati terkait dengan konsep dan strategi Sekolah Alternatif Qoryah Thoyyibah di Desa Kalibening Salatiga sebagai wujud program Wajib Belajar Sembilan Tahun

yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal yang meliputi kekuatan, kesempatan, aspirasi dan indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan konsep dan strategi tersebut.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini melalui:

1. Pengumpulan data-data primer dilakukan melalui:
 - a. Wawancara tatap muka dengan responden atau narasumber dengan menggunakan instrument yang berupa pedoman wawancara. Teknik wawancara dilakukan secara mendalam (*indepth interview*) dalam rangka memperoleh informasi yang lebih banyak. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri (*self report*) atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi (Sugiyono, 2003:157)
 - b. Observasi yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan dan pencatatan gejala-gejala yang nampak serta hal-hal penting yang muncul pada unit amatan penelitian di lapangan.
 - c. Melakukan dokumentasi atau foto di lapangan untuk mengetahui secara jelas keadaan di lapangan.
2. Pengumpulan data-data sekunder melalui literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. Studi pustaka dijelaskan oleh Singarimbun (1985:45) sangat berperan sebagai pendukung dan pembanding serta bahan analisa untuk memperdalam pengetahuan tentang

masalah-masalah yang akan dibahas, menegaskan kerangka teoritis yang dijadikan landasan berpikir, mempertajam konsep serta menghindari terjadinya pegulangan dalam suatu penelitian. Studi pustaka ini penting pula sebagai upaya menelusur penelaahan kepustakaan, sehingga dapat dipelajari bagaimana menggunakan kerangka untuk landasan jalan pemikiran (Koentjoroningrat, 1985:19)

F. Pemilihan Informan

Dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa narasumber yang disebut sebagai informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 1990:90). Informan ini ditentukan sejauh mana informan memahami permasalahan yang diteliti. Banyak sedikitnya informan tergantung dari banyaknya informasi yang dibutuhkan. Informasi tidak dapat dibatasi baik jumlah maupun orangnya karena dalam penelitian ini ingin memperoleh informasi yang akurat maka digunakan juga teknik *snowballing* dimana informasi yang diperoleh dari *key informan* pertama diteruskan kepada *key informan* di bawahnya.

Key informan yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu Kepala Sekolah Alternatif Qoriyah Thoyibah di Desa Kalibening Salatiga sebagai penanggung jawab pelaksanaan konsep dan strategi sekolah alternatif tersebut, selanjutnya pemilihan informan tergantung pada keterangan kepala sekolah terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktek pelaksanaan dan pengembangan konsep dan strategi Sekolah Alternatif Qoryah Thoyyibah di Desa Kalibening Salatiga sebagai wujud program Wajib Belajar Sembilan

Tahun. Untuk memperoleh kebenaran, maka dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data yang berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Moleong, 1990:178). Triangulasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan meng-*cross check* informasi dari informan yang satu dengan informan yang lain, melihat kondisi senyatanya dan mencocokkan dengan sumber data yang tersedia.

G. Instrumen Penelitian

Metode wawancara dan observasi menuntut keaktifan peneliti di lapangan. Jadi instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah manusianya yaitu peneliti. Ciri-ciri umum manusia sebagai instrumen mencakup segi responsif, dapat menyesuaikan diri, menekan keutuhan, mendasarkan diri atas pengetahuan, memproses data secepatnya dan memanfaatkan kesempatan untuk mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan memanfaatkan kesempatan mencari respon yang tidak lazim atau idiosinkratik (Moleong, 1990:121).

Sebagai alat bantu yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data, digunakan buku catatan, alat perekam, pedoman wawancara, dan kamera untuk merekam gambar-gambar selama proses penelitian

H. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun lisan. Analisis data diperlukan untuk menyempitkn dan membatasi penemuan yang ada sehingga

menjadi data yang teratur, tersusun dan lebih berarti. Dalam analisis data ini terdiri dari tiga alur yaitu:

1. Reduksi data, yaitu diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari hasil penelitian
2. Display data, yaitu diartikan sebagai kumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan-kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada bentuk penyajian yang bersifat deskriptif atau penggambaran.
3. Menarik kesimpulan atau verifikasi, hal ini merupakan langkah terakhir dalam analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan ini tergantung pada besarnya kumpulan catatan-catatan di lapangan, penyimpanan, kecakapan, dan kejelian dalam menganalisa data kasar tersebut.

Analisa dalam penelitian ini juga menggunakan analisa SOAR yang disusun berdasarkan pilihan-pilihan prioritas, logika dan waktu. Setelah data terkumpul, maka akan diuraikan analisis SOAR yang berisi pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pelaksanaan dan pengembangan konsep dan strategi Sekolah Alternatif Qoryah Thoyyibah di Desa Kalibening Salatiga di Desa Kalibening Salatiga di Desa Kalibening Salatiga sebagai wujud Program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Faktor-faktor yang dianalisis berdasarkan fenomena penelitian yaitu terhadap faktor-faktor di lingkungan internal dan eksternal sekolah.

Dasar pijak analisis logika dari SOAR adalah memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*) serta aspirasi (*aspirations*) untuk mencapai hasil yang ingin dicapai atau indikator keberhasilan (*result*).

Sedangkan tahap dari analisis strategi dan konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan mandat dan misi organisasi

Bagi suatu organisasi penentuan misi sangat penting karena misi itu bukan hanya sangat mendasar sifatnya, akan tetapi membuat organisasi mempunyai jatidiri yang bersifat khas. Misi dapat membedakan organisasi satu dengan organisasi lainnya. Misi adalah suatu pernyataan singkat dan menyeluruh tentang manfaat dari organisasi, program atau sub program. (Gaspersz, 2004:14)

b. Mengidentifikasi dan menganalisis dukungan lingkungan eksternal

Penilaian eksternal (sering juga disebut sebagai *environmental scan*) merupakan suatu analisis dari elemen-elemen kunci eksternal atau kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi lingkungan dimana organisasi itu berada. (Gaspersz, 2004:13). Melalui analisis terhadap lingkungan eksternal dapat diketahui faktor-faktor yang dapat dijadikan peluang maupun untuk menjangkau aspirasi yang ada bagi perkembangan organisasi. Lingkungan eksternal yang akan dianalisis dalam penelitian ini mencakup:

1. Kebijakan-kebijakan eksternal organisasi yang mendorong pada keberhasilan organisasi:
2. Aktor-aktor yang terlibat dalam pencapaian keberhasilan organisasi:
3. Daya dukung lingkungan eksternal organisasi:
4. Kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar organisasi:
5. Aspirasi dan apresiasi dari lingkungan di luar sekolah yang mendukung pelaksanaan dari konsep dan strategi Sekolah Alternatif Qoryah Thoyyibah:
6. Hasil pelaksanaan dari konsep dan strategi Sekolah Alternatif Qoryah Thoyyibah bagi masyarakat sekitar.

c. Mengidentifikasi dan menganalisis dukungan lingkungan internal

Setiap organisasi memerlukan dukungan faktor-faktor internal organisasi dalam mencapai keberhasilan. Faktor-faktor internal tersebut meliputi:

1. Sumber-sumber yang dimiliki organisasi
 - a. Sumberdaya manusia (*Man*)
 - b. Keuangan (*Money*)
 - c. Sarana dan prasarana (*Machine*)
 - d. Bahan (*Material*)
 - e. Metode (*Method*)
 - f. Pengelolaan (*Management*)

2. Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai organisasi
3. Peluang apa saja yang dapat diciptakan oleh organisasi
4. Aspirasi dan Apresiasi dari dalam organisasi
5. Hasil pelaksanaan dari konsep dan strategi bagi anggota organisasi.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

Desa Kalibening semula menjadi bagian wilayah Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang. Berdasarkan ini mendagri tersebut di atas, desa ini dijadikan salah satu desa yang digabungkan ke wilayah Kodya Salatiga. Meskipun saat ini sudah menjadi bagian dari Kodya Salatiga, namun struktur pemerintahan di Kalibening, belum berganti dari desa menjadi kelurahan. Sehingga pada awal tahun 1998 masih dilakukan pemilihan Kepala Desa, yang menjabat sampai sekarang ini.

Letak desa ini, dapat dikatakan pantas menjadi bagian dari Kodya Salatiga, karena letaknya yang relatif dekat dari pusat Kodya Salatiga, yaitu sekitar 4 Kilometer. Hanya saja, suasana desa ini memang jauh berbeda dengan suasana kota pada umumnya.

Sebagian besar wilayah desa ini masih merupakan persawahan, demikian halnya dengan penduduknya sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh tani. Luas wilayah desa Kalibening 908.884,5 Meter persegi yang terbagi: sawah 550.125,5; pekarangan 23,142; kering (kebun/pekarangan) 236.656; tanah kosong dan bangunan 99.961. Luas sawah berdasarkan potensi pengairan: cukup air 158.341; sulit air 202.292; kurang air 190.492,5.

Kondisi sosial-ekonomi

Sampai dengan tahun 1990-an, perekonomian masyarakat Kalibening masih didominasi oleh sektor pertanian, dengan produk unggulannya padi. Karena persawahan yang menghasilkan padi, sangat membutuhkan air maka, sejak muncul permasalahan berupa kekurangan air telah mendorong terjadinya perubahan besar di Kalibening.

Permasalahan air di kalibening, terkait dengan perjalanan irigasi Kali Cengek yang tidak mampu lagi memberikan suplai air bagi persawahan. Ada dua hal yang menjadi sebab permasalahan ini. Pertama, kehadiran PT. Damatex yang pada tahun 1980-an memperluas areal pabrik dari 3 ha menjadi 10 ha, yang berakibat membengkaknya kebutuhan air mereka. Air yang seharusnya mengalir untuk persawahan terserap ke PT. Damatex. Kedua, PDAM (dibangun kira-kira 1977 di tangsi 411), yang menyalurkan air dari sumber air Senjoyo (salah satu sumber aliran air di Kali Cengek) yang menjadi sumber air bagi masyarakat Kalibening berkurang.

Karena permasalahan itu, terjadi alih profesi dari pertanian ke non pertanian. Kaum laki-laki menjatuhkan pilihan menjadi buruh pabrik dan bangunan, juga sebagai tukang becak. Sedangkan kaum perempuan melalui berdagang, yang sebagian besar mengawali usaha dagangannya dari jual beli komoditas pertanian. Selain yang sudah disebutkan, muncul pula “home industry” rambak (kerupuk) di Kalibening, serta bidang jasa lainnya yaitu pertukangan dan menjahit. Sehingga

sampai sekarang, banyak buruh jahit di Kalibening, terutama dari kalangan mudanya.

Meskipun sektor pertanian terus mengalami keterdesakan yang disebabkan oleh kekurangan air, tetapi kehadiran pekerjaan baru tersebut di atas merupakan fenomena yang melekat pada kaum muda. Pertanian tetap menjadi penopang kehidupan utama di desa ini.

Peternakan sebagai bagian dari pertanian, juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Kalibening. Mereka umumnya memelihara ternak seperti Kambing dan sapi, yang diperuntukkan bagi â€œcelenganâ€™™ (tabungan) serta untuk pengolahan lahan pertanian. Menurut informasi anggota Al Barokah, sampai saat ini di Kalibening, belum ada mesin yang digunakan sebagai alat untuk pengolahan sawah. Budidaya ternak ini dirasakan belum optimal, karena mahal biaya ngerumput. Bahkan berdasarkan perhitungan petani di kalibening, akan lebih menguntungkan menjadi buruh mencari rumput daripada memelihara ternak. Tentu saja hal ini dengan perbandingan apabila ternak yang diperlihara tidak banyak (4 ke bawah).

Kalibening merupakan desa yang berpenduduk 100% beragama Islam, baik ketika wilayah tersebut masuk wilayah Kabupaten Semarang maupun sekarang setelah menjadi bagian dari Kodya Salatiga. Di pusat desa ini terletak sebuah pesantren yang dapat digolongkan besar karena memiliki 100 orang santri laki-laki dan perempuan. Karena keadaan ini, barangkali, Kalibening dilihat sebagai sentral dalam hal ke Islaman oleh masyarakat di desa sekitarnya. Dapat kita amati bahwa

Kalibening menjadi tempat memusatnya jamaah sholat Jumat dari beberapa desa di sekitar, antara lain: Krasak, Klumpit, dan Kali Londo.

Latar kultur ini, mendorong pembangunan sarana ibadah seperti masjid dan mushola lebih intensif dibandingkan tempat tinggal. Adalah pemandangan biasa di desa ini, mesjid dan mushola lebih bagus dan megah dibandingkan dengan rumah penduduk. Pengajian merupakan kegiatan yang selalu dilaksanakan serta mengawali seluruh kegiatan lainnya.

Corak perpolitikan di wilayah ini pun tidak terlalu sulit ditebak, karena hampir semuanya menjadi warga NU, dan memiliki tradisi politik yang bersandar pada kyai yang memimpinya. Dalam setiap Pemilihan Umum di era orde Baru yang dilaksanakan di desa ini, selalu dimenangkan oleh PPP sampai dengan tahun 1982, dan selanjutnya Golkar, karena NU kembali ke Khitah. Di Era sekarang, aspirasi masyarakat Kalibening disalurkan lewat PKB dan PDI-P.

Dalam hal penentuan kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat Kalibening, kekuatan masyarakat dapat digolongkan sangat besar, sehingga program-program "paketan" dari atas, relatif dapat dikontrol oleh masyarakat sendiri. "Lembaga-lembaga" demokrasi formal seperti LMD (Lembaga Musyawarah Desa) sama sekali tidak berfungsi. Salah satu kontrol efektif dilakukan Paguyuban Berkah Alam (Al-Barokah). Al-Barokah inilah yang kemudian secara aktif menyalurkan aspirasi warga Kalibening, termasuk mempersiapkan Kepala Desa baru pada awal tahun 1998.

Pendirian Sekolah

SMP Qaryah Thayyibah lahir dari keprihatinan Bahrudin, seorang aktivis gerakan tani di Salatiga melihat pendidikan di Tanah Air yang makin bobrok dan semakin mahal. Pada pertengahan tahun 2003 anak pertamanya akan masuk SMP. Anaknya telah mendapatkan tempat di salah satu SMP favorit di Salatiga. Namun, Bahrudin terusik dengan anak-anak petani lainnya yang tidak mampu membayar uang masuk SMP negeri yang saat itu telah mencapai Rp 750.000, uang sekolah rata-rata Rp 35.000 per bulan, belum lagi uang seragam dan uang buku yang jumlahnya mencapai ratusan ribu rupiah.

Bahrudin yang menjadi ketua rukun wilayah di kampungnya kemudian berinisiatif mengumpulkan warganya menawarkan gagasan, bagaimana jika mereka membuat sekolah sendiri dengan mendirikan SMP alternatif. Dari 30 tetangga yang dikumpulkan, 12 orang berani memasukkan anaknya ke sekolah coba-coba itu. Untuk menunjukkan keseriusannya, Bahrudin juga memasukkan anaknya ke sekolah yang diangan-angankannya. "Saya ingin membuat sekolah yang murah, tetapi berkualitas. Saya tidak berpikir saya akan bisa melahirkan anak yang hebat-hebat. Yang penting mereka bisa bersekolah."

Sekolah itu menempati dua ruangan di rumah Bahrudin, yang sebelumnya digunakan untuk Sekretariat Organisasi Tani Qaryah Thayyibah. Jumlah guru yang mengajar sembilan orang, semuanya lulusan institut agama Islam negeri dan sebagian besar di antaranya para aktivis petani.

Secara fisik dan konseptual, SMP Alternatif Qaryah Thayyibah menyatu dengan alam sekitarnya. Tidak ada pagar yang membatasi sekolah dengan lingkungan sekitarnya. Tidak ada pintu gerbang yang digerendel ketika anak bersekolah. Lingkungan alam di sekitarnya dipergunakan sebagai laboratorium belajar. Sebuah kompor biogas yang diolah dari kotoran hewan dan manusia terang-terangan dipertontonkan kepada siswa untuk memasak.

Bahrudin, yang menjadi Kepala Sekolah SMP QT adalah lulusan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, Semarang. Ia lahir di Desa Kalibening, Kecamatan Tingkir, Salatiga, 9 Februari 1965. Ayahnya adalah anak keempat almarhum K.H. Abdul Halim, pendiri sekaligus pemilik pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin di desa tersebut. Ia sempat bergabung dengan organisasi yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU). Ketika di Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN), ia terlibat dalam kegiatan Anshor. Di kala mahasiswa, ia bergabung dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Sekarang ia juga menjadi Ketua Dewan Pimpinan Petani di Serikat Petani Qaryah Tayyibah.

Secara formal, SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah di Desa Kalibening yang dipimpinnya merupakan SMP terbuka dengan menggunakan kurikulum nasional. Dananya dari APBD Kota Salatiga, sumbangan donator dan kontribusi dari warga dan orangtua siswa. Secara formal, SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah merupakan SMP terbuka dengan menggunakan kurikulum nasional. Sekolah ini mendapat sumbangan operasional dari APBD Kota Salatiga. Sedangkan sekolah induk yang ditunjuk adalah SMPN 10 Salatiga.

Kurikulum di SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah selain berbasis kurikulum nasional, dalam pelaksanaannya lebih mempraktikkan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Sebab dengan jumlah murid yang dibatasi dalam setiap kelas, semua guru mampu mengetahui dan memberikan penilaian sikap serta kemampuan belajar seorang murid mulai dari A hingga Z.

Mata pelajaran tertentu seperti Matematika dan Bahasa dijadikan santapan sehari-hari dan dijadikan mata pelajaran pertama saat sekolah dimulai pada pukul 06.00. Terbukti sekolah yang jumlah muridnya 12 untuk kelas 1 dan 12 murid untuk kelas 2 itu sudah terbiasa dengan mata pelajaran tersebut. Sementara Pendidikan Agama diberikan menjelang akhir sekolah setiap hari, yakni mulai pukul 13.30 hingga pukul 14.00.

Sekolah alternatif ini mengadopsi kurikulum SMP regular, sebab belum sanggup menyusun kurikulum sendiri. Lagi pula sekolah akan diakui sebagai sekolah berkualitas jika bisa memperoleh nilai yang baik dan mendapatkan ijazah yang diakui pemerintah. Karena itulah sekolah ini memilih format SMP Terbuka. Dengan cara ini ia mengubah asumsi bahwa kecenderungan SMP Terbuka sekadar sebagai lembaga untuk membagi-bagi ijazah dengan mengelola pendidikannya secara serius.